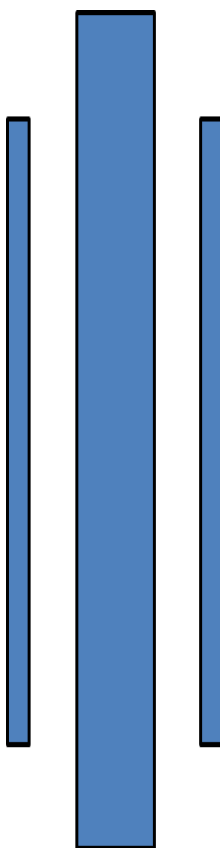




**RENCANA KERJA (RENJA)
KECAMATAN KLIRONG
KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2026**



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KEC. KLIRONG
TAHUN 2025**



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 35 TAHUN 2025

TENTANG

PENGESAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang :
- a. bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) dan Pasal 143 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi menyampaikan seluruh rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah kemudian dapat dijadikan pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengesahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 211);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 182);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 219);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGESAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2026.**

Pasal 1

- (1) Rencana Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen Tahun 2026 merupakan pedoman untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2026.
- (2) Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Pelaksanaan lebih lanjut dari Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercermin dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2026 dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Kebumen lainnya dengan mengantisipasi kemungkinan perubahan kebijakan Pemerintah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 30 Juli 2025
BUPATI KEBUMEN,

ttd.

LILIS NURYANI

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 30 Juli 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

EDI RIAN TO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025 NOMOR 36

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,



AKHMAD HARUN, S.H.

Pembina Tk. I

NIP 19690809 199803 1 006

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga dokumen Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Klirong Tahun 2026 ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Renja Kecamatan Klirong Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang memuat arah kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan kecamatan untuk mendukung pencapaian prioritas pembangunan Kabupaten Kebumen.

Penyusunan dokumen ini mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kebumen, serta memperhatikan aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) di tingkat desa dan kecamatan. Rencana kerja (RENJA) tahun 2026 disusun sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah terdiri dari Pendahuluan, Hasil Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu, Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, Rencana Kerja dari Perangkat Daerah, Perangkat Daerah serta penutup.

Dokumen ini diharapkan menjadi pedoman dan acuan dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat Kecamatan Klirong pada tahun 2026. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Renja ini masih terdapat berbagai kekurangan, untuk itu kami terbuka terhadap masukan dan saran demi penyempurnaan dokumen ini di masa yang akan datang.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam proses penyusunan dokumen ini, khususnya kepada seluruh perangkat daerah, pemerintah desa, tokoh masyarakat, serta stakeholder terkait lainnya.

Akhir kata, semoga dokumen ini dapat memberikan manfaat dan menjadi langkah awal yang baik dalam mewujudkan Kecamatan Klirong yang lebih maju, sejahtera, dan berdaya saing.

Kebumen, 30 Juli 2025

Camat Klirong



Eko Purwanto S.STP.,M.Si

Pembina Tk.1

NIP. 197901161998101001

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	4
1.1. Latar Belakang.....	4
1.2. Landasan Hukum	8
1.3. Maksud dan Tujuan	10
1.4. Sistematika Penulisan	10
BAB II HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN KLIRONG TAHUN LALU	13
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Klirong Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Klirong	13
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	29
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	33
2.3.1. Tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah	33
2.3.2. Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi.....	34
2.3.3. Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah.....	35
2.3.4. Tantangan dan Peluang.	36
2.3.5. Formulasi isu-isu penting	38
2.4. Review Usulan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah.....	39
2.5. Penelaahan Usulan Pogram dan Kegiatan Masyarakat.....	55
BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.....	57
3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional	57
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	59
3.3. Program Dan Kegiatan	60
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	65
BAB V PENUTUP	69
LAMPIRAN	71

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) adalah dokumen perencanaan tahunan yang memuat program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, target capaian, kelompok sasaran, serta kebutuhan pendanaan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Renja Perangkat Daerah disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah serta berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kebumen, dengan memperhatikan arah kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional. Dokumen Renja Perangkat Daerah berfungsi sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam melaksanakan pembangunan, pelayanan, dan penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai tugas dan fungsinya, sekaligus menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Klirong Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah yang berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan di wilayah Kecamatan Klirong. Penyusunan Renja ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari siklus perencanaan pembangunan daerah, yang disusun secara sistematis, terarah, terpadu, dan berkesinambungan sesuai dengan visi dan misi pembangunan Kabupaten Kebumen sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kebumen Tahun 2025–2029. Sebagai dokumen perencanaan tahunan, Renja Kecamatan Klirong tidak hanya menjadi turunan dari Renstra Kecamatan Klirong 2025–2029, melainkan juga menjembatani antara kebutuhan masyarakat di tingkat desa dengan kebijakan pembangunan di tingkat kabupaten, provinsi, hingga nasional. Dengan demikian, dokumen ini mempunyai peranan penting dalam memastikan tercapainya sasaran pembangunan jangka menengah secara konsisten melalui langkah-langkah operasional yang jelas dalam satu tahun anggaran.

Proses penyusunan Renja Kecamatan Klirong Tahun 2025 dilaksanakan melalui tahapan sistematis, partisipatif, dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Tahapan tersebut meliputi penyusunan rancangan awal Renja yang disusun oleh perangkat daerah dengan mengacu pada Rencana Strategis, prioritas pembangunan daerah, serta arah kebijakan pembangunan Kabupaten, Provinsi, dan Nasional. Selanjutnya dilakukan

Forum Perangkat Daerah, yaitu forum konsultasi publik yang melibatkan pemangku kepentingan terkait untuk menyelaraskan rancangan awal Renja dengan kebutuhan masyarakat dan prioritas pembangunan daerah. Setelah forum tersebut, penyusunan rancangan Renja dilaksanakan dengan memperhatikan hasil forum perangkat daerah, pokok-pokok pikiran DPRD, serta hasil Musrenbang mulai dari desa hingga kabupaten. Rancangan Renja yang sudah terbentuk kemudian disinkronkan dan diharmonisasikan dengan RKPD, sehingga menghasilkan rancangan akhir yang lebih terpadu. Tahap terakhir adalah penetapan Renja Perangkat Daerah yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Kepala Perangkat Daerah sebagai dasar pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan selama periode 1 (satu) tahun anggaran.

Gambar 1.1
Tahapan Penyusunan Renja



Selain itu, penyusunan Renja Kecamatan Klirong juga dilakukan dengan melakukan evaluasi terhadap kinerja pelayanan tahun sebelumnya untuk menilai capaian indikator kinerja serta kendala yang dihadapi. Hasil evaluasi menjadi dasar dalam mengidentifikasi permasalahan dan isu strategis yang harus ditangani pada tahun rencana. Aspirasi masyarakat turut dihimpun melalui Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan sehingga kebutuhan yang dirasakan langsung oleh masyarakat dapat masuk ke dalam Renja. Dengan demikian, penyusunan Renja Kecamatan Klirong tidak hanya memenuhi aspek regulasi, tetapi juga mencerminkan kebutuhan riil masyarakat di lapangan.

Keterkaitan Renja Kecamatan Klirong dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya sangat erat dan bersifat hierarkis. Renja Kecamatan merupakan penjabaran operasional dari Renstra Kecamatan Klirong 2025–2029 yang berisi visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan kecamatan selama lima tahun. Program dan kegiatan yang dirumuskan dalam Renja

merupakan langkah nyata tahunan untuk mewujudkan target-target yang tercantum dalam Renstra. Keterkaitan ini juga menjamin adanya konsistensi dan kesinambungan antara perencanaan jangka menengah dan tahunan. Hubungan dengan RKPD terbangun secara logis dan fungsional karena Renja Kecamatan Klirong menjadi bahan utama penyusunan RKPD Kabupaten Kebumen. RKPD Kabupaten kemudian menjadi dasar penyusunan dokumen anggaran berupa RAPBD. Oleh karena itu, setiap Renja harus disusun dengan baik agar dapat berkontribusi besar terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Hubungan Renja dengan Renstra Perangkat Daerah dapat dilihat dari konsistensi program, penjabaran sasaran, dan dasar pengukuran kinerja. Program dan kegiatan dalam Renja Kecamatan Klirong merupakan implementasi tahunan dari program prioritas yang sudah ditetapkan dalam Renstra, sehingga arah pelaksanaan pembangunan tetap konsisten dengan tujuan jangka menengah. Capaian indikator kinerja tahunan dalam Renja berkontribusi terhadap capaian indikator strategis Renstra. Keberhasilan Renja pada gilirannya menentukan keberhasilan pencapaian target Renstra.

Renja Kecamatan Klirong juga memiliki keterkaitan dengan Renja Provinsi Jawa Tengah dan Renja Kabupaten Kebumen. Dalam konteks provinsi, program dan kegiatan kecamatan harus memperhatikan arah kebijakan pembangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Program yang bersifat lintas wilayah atau mendukung prioritas provinsi, seperti pengentasan kemiskinan, pembangunan infrastruktur dasar, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan pelayanan publik, harus diselaraskan dengan prioritas pembangunan provinsi. Hal ini bertujuan agar capaian pembangunan di Kabupaten Kebumen, termasuk di Kecamatan Klirong, dapat mendukung target pembangunan provinsi secara keseluruhan. Sementara itu, keterkaitan dengan Renja Kabupaten Kebumen tercermin dari keselarasan antara arah kebijakan dan prioritas pembangunan kabupaten yang tertuang dalam RKPD. Usulan kegiatan dari Kecamatan Klirong yang dirumuskan dalam Renja akan menjadi bagian dari penyusunan RKPD Kabupaten Kebumen, sehingga terwujud konsistensi antara perencanaan di tingkat kecamatan dengan dokumen perencanaan kabupaten. Dengan demikian, Renja Kecamatan Klirong berfungsi sebagai dokumen operasional yang menjembatani aspirasi masyarakat di tingkat lokal dengan kebijakan pembangunan di tingkat kabupaten dan provinsi.

Selanjutnya, Renja Kecamatan Klirong Tahun 2025 ditindaklanjuti dengan proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Kebumen yang kemudian menjadi dasar dalam penyusunan RAPBD. Dalam mekanisme penganggaran, Renja Kecamatan menjadi dasar penyusunan RKA Perangkat Daerah yang berisi kebutuhan pendanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai target kinerja tahunan. Seluruh RKA dihimpun oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk dirumuskan menjadi Rancangan APBD. Oleh karena itu, konsistensi antara Renja dan RKA sangat menentukan kualitas RAPBD yang diajukan pemerintah daerah kepada DPRD. Sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran ini menjamin bahwa APBD benar-benar membiayai prioritas pembangunan daerah. Karena Renja juga memuat indikator kinerja dan target capaian, maka RAPBD yang disusun berdasarkan Renja turut mendukung pencapaian target tersebut, sekaligus memperkuat prinsip akuntabilitas dan keterpaduan antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran.

Dengan melihat keseluruhan proses, dapat ditegaskan bahwa Renja Kecamatan Klirong Tahun 2025 merupakan dokumen yang memegang peranan kunci dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Dokumen ini tidak hanya berfungsi sebagai pedoman kerja bagi perangkat kecamatan dalam melaksanakan program dan kegiatan selama satu tahun anggaran, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjaga konsistensi perencanaan pembangunan antara dokumen jangka menengah dan tahunan. Renja Kecamatan Klirong Tahun 2025 sekaligus menjadi wujud nyata implementasi prinsip-prinsip perencanaan pembangunan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel. Melalui penyusunan Renja yang terintegrasi dan selaras dengan dokumen perencanaan di atasnya, pembangunan di Kecamatan Klirong diharapkan lebih tepat sasaran, efektif dalam pemanfaatan sumber daya, serta mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

1.2. Landasan Hukum

Rencana Kerja Kecamatan Klirong disusun berdasarkan regulasi (peraturan perundang-undangan yang berlaku) guna menjamin kepastian hukum perencanaan maupun pelaksanaannya. Berikut ini merupakan landasan hukum penyusunan Renja Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen tahun 2026:

1. Peraturan Bupati Kebumen No. 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen yang juga menjadi acuan kewenangan perangkat daerah kecamatan;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 219);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 182);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 211);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah, tentang mekanisme, proses, dan tata cara penyusunan Renstra, Renja, RKPD, dan hubungan antar dokumen perencanaan daerah.
12. Rencana Strategis Kecamatan Klirong Tahun 2021-2026 sebagai dokumen acuan strategis dalam penyusunan Renja Kecamatan Klirong;
13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
14. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
15. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

17. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja Kecamatan Klirong tahun 2026 ini adalah untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan pembangunan tahunan yang tertuang dalam RKPD Kabupaten Kebumen tahun 2026 serta untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi dengan perencanaan pembangunan yang tertuang dalam Renstra Kecamatan Klirong tahun 2025-2029 sebagai dokumen perencanaan jangka menengah (lima tahun).

Adapun tujuan dari penyusunan Renja Kecamatan Klirong tahun 2026 ini adalah untuk memberikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan Klirong tahun 2026 sekaligus untuk mengevaluasi pencapaian program dan kegiatan di Kecamatan Klirong tahun sebelumnya (2025).

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Kecamatan Klirong disusun sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Bab ini menguraikan tentang:

- 1.1. Latar belakang (SOTK Perangkat Daerah dan Tupoksi), mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja PD, proses penyusunan Renja PD, keterkaitan antara Renja PD dengan dokumen RKPD, Renstra PD, renja kab/kota serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD
- 1.2. Landasan hukum, memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan PD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD
- 1.3. Maksud dan tujuan, memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah
- 1.4. Sistematika penulisan, menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah serta susunan garis besar isi dokumen.

Bab II : Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

Bab ini menguraikan tentang :

- 2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu (2024) dan capaian renstra Perangkat Daerah memuat kajian/ review terhadap Hasil Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu/ 2024, Perkiraan capaian tahun berjalan/2025, selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Dearah tahun-tahun sebelumnya.
- 2.2. Analisis kinerja pelayanan, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja urusan yang diampu oleh Perangkat Daerah.
- 2.3. Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah , mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan Pelayanan Perangkat Daerah, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi perangkat daerah, dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan perangkat daerah, dan formulasi isi-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD, berisikan uraian mengenai perbandingan antara rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan hasil analisis kebutuhan/ penetapan RKPD.
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat, diuraikan hasil kajian terhadap program/ kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan yang langsung ditujukan kepada perangkat daerah (diambil dari hasil Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan Klirong).

Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Bab ini menguraikan tentang :

- 3.1. Telaah terhadap kebijakan Nasional, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi perangkat desa.
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah, perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan

tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra perangkat daerah.

- 3.3. Program & Kegiatan, berisikan penjelasan mengenai, faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan, Penjelasan jika rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal Renja.

Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Rumusan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2026 serta perkiraan maju 2027 perangkat daerah selanjutnya disajikan pada lampiran Rencana Kerja ini.

Bab V : Penutup.

Berisi uraian tentang :

1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun terkait ketersediaan anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan.
2. Kaidah-kaidah pelaksanaan
3. Rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN KLIRONG TAHUN
LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Klirong Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Klirong

Renja Kecamatan Klirong tahun 2026 disusun berdasarkan analisis kondisi objektif permasalahan maupun capaian/keberhasilan yang diraih. Dari permasalahan dan keberhasilan tersebut kemudian disusunlah suatu program, kegiatan dan sub kegiatan. Gambaran permasalahan dimaksudkan untuk mendapatkan pemahaman besarnya tantangan yang masih harus dihadapi Kecamatan Klirong saat sekarang dan perkiraan keadaan yang akan datang. Sedangkan capaian keberhasilan dapat memberikan dorongan dan panduan untuk bagaimana tetap mempertahankan bahkan meningkatkan capaian yang telah diraih.

Renja Kecamatan Klirong tahun lalu, yaitu tahun 2024 harus dievaluasi sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang menyatakan bahwa setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya.

Penyusunan Renja Kecamatan Klirong dimaksudkan untuk menentukan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2026 sebagai penjabaran visi dan misi Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 dan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2045 dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah. Kecamatan Klirong mendukung salah satu prioritas pembangunan daerah yakni misi keempat “ Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Ngopeni, Ngayomi, dan Ngayemi”. Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi, Kecamatan Klirong pada tahun 2026 menjalankan 4 Program, 9 Kegiatan dan 29 Sub Kegiatan. Berikut akan ditampilkan rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 Kecamatan Klirong:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Kecamatan Klirong

Nama Perangkat Daerah : KECAMATAN KLIRONG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program, Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes), Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2025-2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja tahun	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi		Realisasi Renja Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
					2024		(%)			(%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (9)	11=(10/4)
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Kecamatan Klirong (Dengan Satuan:Nilai)	76 nilai	NA	NA	NA	NA	70	100%	92%
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Dok	11	11	11	100%	9	9	90%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program, Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes), Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2025-2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja tahun	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi		Realisasi Renja Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
							(%)			(%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (9)	11=(10/4)
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	6	6	6	100%	5	5	100%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	5	5	5	5	100%	5	5	100%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12	12	12	12	100%	12	12	100%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15	13	13	13	100%	15	15	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program, Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes), Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2025-2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja tahun	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi		Realisasi Renja Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
					2024		(%)			(%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (9)	11=(10/4)
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	5	NA	NA	NA	NA	3	3	60%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12	12	12	12	12	12	12	100%
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	2	NA	NA	NA	NA	2	2	100%
	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan Logistik Kantor yang	8	NA	NA	NA	NA	2	2	25%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program, Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes), Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2025-2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja tahun	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi		Realisasi Renja Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
					2024		(%)			(%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (9)	11=(10/4)
		disediakan								
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	2	NA	NA	NA	NA	2	2	100%
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12	NA	NA	NA	NA	2	2	17%
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket bahan/material yang disediakan	4	NA	NA	NA	NA	3	3	75%
	Penyelenggaraan Rapat-rapat dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	10	NA	NA	NA	NA	6	6	60%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program, Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes), Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2025-2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja tahun	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi		Realisasi Renja Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
					2024		(%)			(%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (9)	11=(10/4)
		Konsultasi SKPD								
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	12	NA	NA	NA	NA	12	12	100%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4	23	8	8	100%	4	4	100%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4	3	4	4	100%	18	18	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program, Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes), Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2025-2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja tahun	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi		Realisasi Renja Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
							(%)			(%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (9)	11=(10/4)
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15	5	6	6	100%	2	2	13%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	12	12	12	12	12	12	100%
	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15	NA	NA	NA	NA	15	15	100%
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	12	NA	NA	NA	NA	12	12	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program, Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes), Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2025-2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja tahun	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi		Realisasi Renja Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
					2024		(%)			(%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (9)	11=(10/4)
		disediakan								
	Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	4	NA	NA	NA	NA	4	4	100%
	Kegiatan Pemeliharaan barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	27	37	36	36	36	27	27	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program, Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes), Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2025-2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi		Realisasi Renja Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
							(%)			(%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (9)	11=(10/4)
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	13	10	10	10	100%	13	13	100%
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara	5	5	4	4	100%	5	5	100%
	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	8	20	24	24	NA	8	8	100%
	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	3 Unit	2	2	2	100%	3 Unit	3 Unit	8%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program, Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes), Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2025-2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi		Realisasi Renja Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
							(%)			(%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (9)	11=(10/4)
	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Klirong	100	NA	NA	NA	NA	100	100	100%
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Presentase penanganan pengaduan masyarakat	100%	NA	NA	NA	NA	100%	100%	100%
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	4 laporan	NA	NA	NA	NA	4 laporan	4 laporan	100%
	Program Penyelenggaraan Urusan	Indeks Kondusivitas Kecamatan Klirong	100%	NA	NA	NA	NA	100%	100%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program, Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes), Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2025-2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja tahun	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi		Realisasi Renja Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
					2024		(%)			(%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (9)	11=(10/4)
	Pemerintahan Umum									
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	100%	2 Kegiatan	2 Kegiatan	16%
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan	96 orang	NA	NA	NA	NA	96 orang	96 orang	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program, Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes), Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2025-2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja tahun	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi		Realisasi Renja Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
					2024		(%)			(%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (9)	11=(10/4)
	Pancasila, Pelaksanaan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia								
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Prosentase Desa di Kecamatan Klirong yang melaksanakan	100%	NA	NA	NA	NA	100%	100%	%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program, Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes), Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2025-2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja tahun	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi		Realisasi Renja Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
					2024		(%)			(%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (9)	11=(10/4)
		APBDes sesuai Ketentuan								
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	8 Keg	NA	NA	NA	NA	8 Keg	8 Keg	6%
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12 dokumen	NA	NA	NA	NA	12 dokumen	12 dokumen	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program, Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes), Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2025-2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi		Realisasi Renja Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
							(%)			(%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (9)	11=(10/4)
	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	2 dokumen	NA	NA	NA	NA	2 dokumen	2 dokumen	100%
	Fasilitasi Singkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	12 dokumen	NA	NA	NA	NA	12 dokumen	12 dokumen	100%
	Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan	2 dokumen	NA	NA	NA	NA	1 dokumen	1 dokumen	50%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program, Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes), Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2025-2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja tahun	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi		Realisasi Renja Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
					2024		(%)			(%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (9)	11=(10/4)
		Ketertiban Umum								
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	2 dokumen	NA	NA	NA	NA	2 dokumen	2 dokumen	100%
	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	8 dokumen	NA	NA	NA	NA	2 dokumen	2 Keg	24%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program, Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes), Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2025-2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja tahun	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi		Realisasi Renja Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (9)	11=(10/4)
	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	4 laporan	NA	NA	NA	NA	2 laporan	2 Kegiatan	50%

Berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Klirong dijelaskan bahwa Kecamatan Klirong mempunyai tugas untuk: 1) mengkoordinasikan dan menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan; dan 2) melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten serta tugas lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara fungsi dari kecamatan disebutkan sebagai berikut:

1. perumusan kebijakan teknis di tingkat kecamatan;
2. pengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di tingkat kecamatan;
3. pembinaan dan pelaksanaan tugas pemerintahan di kecamatan;
4. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh Bupati;
5. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati. Berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan. Sementara fungsi dari kecamatan disebutkan sebagai berikut:

- a. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- e. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang

- dilakukan oleh perangkat daerah ditingkat kecamatan;
- g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
 - h. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
 - i. perencanaan, pengoordinasian, pengendalian dan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
 - j. fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - k. pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa; dan
 - l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Wewenang Bupati Kebumen Kepada Camat, Kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah meliputi aspek perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan dan penyelenggaraan. Pelimpahan sebagian urusan yang menjadi wewenang Bupati yang dilimpahkan kepada Camat tersebut dimaksudkan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga tercipta pelayanan masyarakat yang profesional, transparan, efektif dan efisien.

Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa jenis pelayanan utama yang ada di Kecamatan Klirong namun secara umum pelayanan di Kecamatan Klirong dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Pelayanan teknis administrasi baik kedalam maupun keluar;
2. Pelayanan legalisasi surat-surat dan rekomendasi kepada masyarakat;
3. Pelayanan yang bersifat penyediaan data atau informasi kepada dinas Instansi yang berada di wilayah Kecamatan maupun Pemerintah Kabupaten Kebumen;

4. Pelayanan kepada pemerintahan desa dan masyarakat terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan sosial kemasyarakatan.

Selanjutnya, terkait dengan pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Klirong Tahun 2024 sangat baik. Hal ini dapat dinilai dari rasio capaian indikator kinerja Kecamatan Klirong yang dapat terealisasi sebesar 89.96% dari target yang telah ditentukan. Indikator Kinerja Utama Kecamatan yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan, berikut ini disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Klirong:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Klirong tahun 2025
Kabupaten Kebumen

NO	Indikator	SPM / standar nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahu n 2024 (thn n- 2)	Tahu n 2025 (thn n- 1)	Tahu n 2026 (tnn n)	Tahu n 2027 (thn n+1)	Tahu n 2024 (thn n-2)	Tahun 2025 (thn n- 1)	Tahu n 2026 (tnn n)	Tahu n 2027 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan Klirong			87,00	91,00	92,00	93,00	89,66	91,00	92,00	93,00	
	Sasaran :											
2	Indeks Tata Kelola Kecamatan Klirong			100	100	100	100	100	100	100	100	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kecamatan Klirong

2.3.1. Tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayananan Perangkat Daerah

Secara umum, kinerja pelayanan Kecamatan Klirong menunjukkan perkembangan yang cukup baik, ditandai dengan terselenggaranya berbagai layanan administrasi pemerintahan, pelayanan perizinan tertentu, serta koordinasi pembangunan wilayah. Namun demikian, masih terdapat sejumlah hal yang perlu ditingkatkan, antara lain:

- a. Pelayanan administrasi kependudukan sudah berjalan sesuai ketentuan, namun masih terkendala keterbatasan sarana pendukung dan jumlah petugas, sehingga kecepatan layanan belum optimal.
- b. Pelayanan perizinan dan penerbitan rekomendasi telah dilaksanakan sesuai standar prosedur, tetapi pemanfaatan teknologi informasi masih terbatas, sehingga aksesibilitas layanan bagi masyarakat belum sepenuhnya memadai.
- c. Koordinasi dengan perangkat daerah lain dalam mendukung program pembangunan wilayah relatif berjalan, namun belum optimal sehingga terkadang menimbulkan keterlambatan pelaksanaan kegiatan atau duplikasi program.
- d. Secara umum, pelayanan publik telah mengalami peningkatan, tetapi masih terdapat kesenjangan antara harapan masyarakat dengan kualitas layanan, terutama dari aspek ketepatan waktu, transparansi, dan kemudahan prosedur.

Beberapa hal kritis yang perlu segera mendapatkan perhatian dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan Klirong antara lain:

- Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) baik dari segi jumlah maupun kompetensi teknis, sehingga berpengaruh terhadap kualitas dan kecepatan pelayanan.
- Ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan yang belum memadai, khususnya ruang pelayanan yang representatif, jaringan internet yang stabil, serta perangkat layanan berbasis digital.
- Integrasi data dan sistem informasi antar perangkat daerah yang belum optimal, menyebabkan beberapa proses masih dilakukan

secara manual, yang rawan menimbulkan keterlambatan dan ketidakakuratan data.

- **Partisipasi masyarakat** dalam pengawasan dan perencanaan pembangunan wilayah masih relatif rendah, sehingga pelayanan publik belum sepenuhnya responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
- **Peningkatan ekspektasi masyarakat** terhadap kualitas layanan menuntut kecamatan untuk lebih adaptif, inovatif, dan transparan dalam penyelenggaraan pelayanan.

Dengan memperhatikan isu-isu penting tersebut, maka diperlukan strategi peningkatan kapasitas perangkat daerah, penguatan koordinasi lintas sektor, pemanfaatan teknologi informasi, serta peningkatan partisipasi masyarakat guna mewujudkan pelayanan publik yang lebih cepat, tepat, transparan, dan akuntabel.

2.3.2. Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Klirong

a. Permasalahan

- 1) Masih terbatasnya jumlah aparatur kecamatan yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan pelayanan publik.
- 2) Kualitas pelayanan administrasi kependudukan belum sepenuhnya memenuhi harapan masyarakat, terutama dari aspek kecepatan dan ketepatan layanan.
- 3) Koordinasi lintas perangkat daerah belum optimal sehingga menimbulkan keterlambatan pelaksanaan kegiatan pembangunan di wilayah kecamatan.
- 4) Pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pelayanan publik masih rendah, mengakibatkan akses layanan masyarakat belum sepenuhnya efisien.
- 5) Partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi pembangunan wilayah masih kurang.

b. Hambatan

- 1) Keterbatasan anggaran untuk peningkatan sarana prasarana pelayanan publik, termasuk fasilitas ruang pelayanan dan jaringan internet.
- 2) Kendala teknis pada infrastruktur teknologi informasi, seperti jaringan internet yang belum stabil di beberapa desa,

sehingga pelayanan berbasis digital belum dapat berjalan optimal.

- 3) Beban kerja aparaturnya kecamatan yang tinggi dengan jumlah SDM terbatas, mengakibatkan pelayanan tidak selalu sesuai dengan standar waktu yang ditetapkan.
- 4) Kurangnya pelatihan dan pengembangan kapasitas aparaturnya, sehingga kompetensi teknis dalam memberikan layanan masih bervariasi.
- 5) Rendahnya kesadaran masyarakat dalam melengkapi dokumen persyaratan administrasi, sehingga memperlambat proses pelayanan.
- 6) Adanya regulasi atau prosedur pelayanan yang dinilai masih rumit, sehingga menyulitkan masyarakat dalam mengakses layanan.

2.3.3. Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional seperti NSPK, SPM, dan SDGs

Permasalahan dan hambatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Klirong berimplikasi langsung terhadap efektivitas pencapaian visi dan misi Bupati Kebumen, terutama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, pelayanan publik yang prima, serta pembangunan yang berkelanjutan. Adapun dampaknya dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Terhadap Pencapaian NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria)
 - a) Keterbatasan SDM dan sarana prasarana pelayanan berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun daerah.
 - b) Proses pelayanan administrasi yang belum sepenuhnya berbasis digital menyebabkan penerapan prosedur layanan belum seragam, sehingga kualitas pelayanan antar wilayah desa bervariasi.
 - c) Hambatan koordinasi lintas sektor dapat mengurangi kepatuhan terhadap norma dan prosedur perencanaan pembangunan daerah.
2. Terhadap Pencapaian SPM (Standar Pelayanan Minimal)
 - a) Standar waktu pelayanan administrasi kependudukan sulit dipenuhi akibat keterbatasan SDM dan dukungan teknologi.
 - b) Beberapa layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan

infrastruktur yang menjadi bagian dari SPM belum terintegrasi sepenuhnya dalam sistem pelayanan kecamatan, sehingga capaian SPM di tingkat wilayah menjadi terhambat.

- c) Keterlambatan atau ketidakmerataan akses layanan publik berpotensi menurunkan kualitas capaian indikator SPM, khususnya dalam pelayanan dasar yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
3. Terhadap Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)
- a) Hambatan pelayanan administrasi dan pembangunan wilayah dapat berdampak pada keterlambatan pencapaian **SDGs tujuan 16** (Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh), terutama terkait peningkatan efektivitas, akuntabilitas, dan transparansi lembaga publik.
 - b) Terbatasnya layanan dasar dan partisipasi masyarakat dapat mempengaruhi pencapaian **SDGs tujuan 3** (Kehidupan Sehat dan Sejahtera), **tujuan 4** (Pendidikan Berkualitas), dan **tujuan 9** (Infrastruktur dan Inovasi).
 - c) Kesenjangan pelayanan antar desa berimplikasi terhadap **SDGs tujuan 10** (Mengurangi Ketimpangan) karena tidak semua masyarakat memperoleh akses layanan publik dengan standar yang sama.
 - d) Rendahnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik dapat memperlambat transformasi menuju **SDGs tujuan 11** (Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan) yang menuntut adanya tata kelola pemerintahan yang modern, inklusif, dan berdaya saing.

Dengan demikian, permasalahan dan hambatan yang ada di Kecamatan Klirong perlu segera diatasi melalui strategi penguatan kapasitas kelembagaan, pemanfaatan teknologi digital, peningkatan kompetensi SDM, serta optimalisasi koordinasi lintas perangkat daerah agar pencapaian visi dan misi kepala daerah serta target NSPK, SPM, dan SDGs dapat berjalan efektif.

2.3.4. Tantangan dan Peluang.

Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan perangkat daerah, Kecamatan Klirong menghadapi sejumlah tantangan yang perlu segera diatasi. Tantangan utama adalah keterbatasan sumber daya manusia, baik dari sisi jumlah maupun kompetensi, yang belum sepenuhnya mampu mengimbangi kebutuhan pelayanan publik yang

semakin kompleks. Kondisi ini diperparah dengan masih minimnya sarana dan prasarana pendukung, seperti ruang pelayanan yang belum representatif, keterbatasan perangkat digital, serta jaringan internet yang belum merata di seluruh desa. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik masih terbatas, sehingga akses layanan masyarakat belum berjalan optimal. Koordinasi antar perangkat daerah juga belum sepenuhnya efektif, sering menimbulkan keterlambatan dalam pelaksanaan program pembangunan. Di sisi lain, rendahnya partisipasi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan, baik dalam melengkapi dokumen administrasi maupun dalam perencanaan pembangunan, turut menjadi hambatan. Tantangan lainnya adalah meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap layanan yang lebih cepat, mudah, dan transparan, sementara dukungan anggaran untuk peningkatan kualitas pelayanan masih terbatas.

Meskipun demikian, Kecamatan Klirong juga memiliki sejumlah peluang strategis untuk memperbaiki dan meningkatkan pelayanan publik. Adanya komitmen pemerintah daerah dalam reformasi birokrasi serta peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi peluang penting bagi kecamatan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan. Perkembangan teknologi digital yang semakin pesat dapat dimanfaatkan untuk mendorong percepatan layanan berbasis elektronik, sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat modern. Potensi partisipasi masyarakat yang semakin kritis dan terbuka terhadap transparansi pelayanan publik juga dapat dimanfaatkan sebagai mitra dalam pengawasan dan evaluasi. Selain itu, sinergi dan kemitraan dengan pemerintah desa membuka ruang untuk memperkuat pelayanan dasar serta mempercepat pembangunan wilayah. Dukungan program nasional maupun daerah, seperti pelayanan administrasi kependudukan, peningkatan infrastruktur, dan inovasi pelayanan publik, juga menjadi peluang besar yang dapat dimaksimalkan. Lebih jauh, kerangka pembangunan berkelanjutan (SDGs) mendorong kecamatan untuk lebih fokus pada tata kelola pemerintahan yang baik, inklusif, dan inovatif. Kehadiran generasi muda yang semakin akrab dengan teknologi juga merupakan peluang untuk memperluas sosialisasi, edukasi, dan pemanfaatan layanan digital di wilayah Kecamatan

Klirong.

2.3.5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan

Berdasarkan identifikasi permasalahan, hambatan, tantangan, dan peluang dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah Kecamatan Klirong, dapat dirumuskan beberapa isu strategis yang perlu mendapat perhatian dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun mendatang.

1. Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan
 - a) Rekomendasi: Melaksanakan program penguatan kapasitas SDM melalui pelatihan teknis, bimbingan teknis pelayanan publik, serta peningkatan kompetensi digital aparatur.
 - b) Catatan Strategis: Diperlukan dukungan anggaran yang memadai dan kerjasama lintas perangkat daerah agar kualitas pelayanan semakin profesional dan responsif.
2. Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
 - a) Rekomendasi: Mengembangkan dan memanfaatkan sistem layanan berbasis digital untuk administrasi kependudukan, perizinan, serta layanan publik lainnya.
 - b) Catatan Strategis: Perlu memperkuat infrastruktur jaringan internet di seluruh desa serta memastikan keterhubungan sistem informasi antar perangkat daerah.
3. Penguatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik
 - a) Rekomendasi: Peningkatan kualitas ruang pelayanan, penyediaan fasilitas penunjang, serta modernisasi perangkat teknologi untuk mendukung pelayanan publik.
 - b) Catatan Strategis: Perlu sinergi dengan pemerintah kabupaten dan desa untuk mendukung penyediaan infrastruktur yang lebih merata dan berkelanjutan.
4. Peningkatan Koordinasi Lintas Sektor
 - a) Rekomendasi: Mengoptimalkan forum koordinasi antar perangkat daerah dan desa untuk menyelaraskan program pembangunan wilayah.
 - b) Catatan Strategis: Diperlukan mekanisme koordinasi yang jelas, reguler, dan berbasis data agar tidak terjadi tumpang tindih program serta dapat mempercepat pencapaian target pembangunan.

5. Penguatan Partisipasi Masyarakat

- a) Rekomendasi: Melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan serta pelayanan publik melalui forum musrenbang, pengaduan publik, dan media digital.
- b) Catatan Strategis: Perlu strategi komunikasi publik yang efektif agar masyarakat lebih sadar, aktif, dan bertanggung jawab dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik.

6. Peningkatan Kualitas Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan SDGs

- a) Rekomendasi: Menyusun program dan kegiatan yang berorientasi pada pemenuhan layanan dasar, seperti administrasi kependudukan, kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur pelayanan publik.
- b) Catatan Strategis: Perlu memperkuat integrasi data, monitoring, dan evaluasi agar capaian SPM dan indikator SDGs dapat terukur, konsisten, dan berkelanjutan.

2.4 Review Usulan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Rancangan awal penyusunan RKPD Tahun 2026 yang disusun sesuai hasil analisis kebutuhan, didalam proses penetapannya mengalami perubahan walaupun tidak signifikan, hal ini dikarenakan:

- a. Adanya peraturan dan kebijakan dari Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam bentuk rasionalisasi dan refocusing anggaran. Beberapa program dan kegiatan berkurang anggaran sehingga perlu penyesuaian. Hal tersebut bisa dilihat dalam tabel 2.6;
- b. Alokasi anggaran yang diberikan kepada Kecamatan Klirong;
- c. Perubahan situasi dan kondisi lingkungan di Kecamatan Klirong.

Rencana kerja (Renja) merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang akan dilaksanakan setiap tahun. Dokumen Rencana Kerja (Renja) tahun 2026 yang disusun sekarang ini memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran serta rencana capaiannya yang merupakan tolak ukur keberhasilan dari tugas pokok dan fungsi Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen. Kegiatan yang ada dalam rancangan awal RKPD di Kecamatan Klirong dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal Renja Tahun 2026
Kabupaten Kebumen
Perangkat Daerah : Kecamatan Klirong

No	Rancangan Awal Renja					Hasil Analisis Kebutuhan (Pagu Penetapan)					Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
					(Rp.)					(Rp.)	
	KECAMATAN KLIRONG				2.277.530.237	KECAMATAN KLIRONG				2.397.220.222	
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Kec. Klirong	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	2.143.530.237	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Kec. Klirong	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	2.264.652.222	
	Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	9 Dok	6.000.000	Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	10 Dok	9.500.000	

No	Rancangan Awal Renja					Hasil Analisis Kebutuhan (Pagu Penetapan)					Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
					(Rp.)					(Rp.)	
	Penyusunan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Klirong	Jumlah Dokumen Perencanaan, Perangkat Daerah	5 Dok	3.000.000	Penyusunan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Klirong	Jumlah Dokumen Perencanaan, Perangkat Daerah	5 Dok	5.500.000	
	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Kec. Klirong	Jumlah Dokumen evaluasi perangkat daerah yang tersusun	4 Laporan	3.000.000	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Kec. Klirong	Jumlah Dokumen evaluasi perangkat daerah yang tersusun	5 Laporan	4.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Prosentase terlaksananya kegiatan administrasi keuangan	100%	1.957.067.381	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Prosentase terlaksananya kegiatan administrasi keuangan	100%	2.040.029.687	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Klirong	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	15	1.957.067.381	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Klirong	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	15	2.032.029.687	

No	Rancangan Awal Renja					Hasil Analisis Kebutuhan (Pagu Penetapan)					Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
					(Rp.)					(Rp.)	
	Pelaksanaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kec. Klirong	Jumlah bulan pelaksanaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12 Bulan	7.000.000	Pelaksanaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kec. Klirong	Jumlah bulan pelaksanaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12 Bulan	8.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Bulan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	44.962.856	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Bulan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	49.690.535	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kec. Klirong	Jumlah Jenis Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	4 Paket	3.000.000	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kec. Klirong	Jumlah Jenis Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2 Paket	3.000.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Klirong	Jumlah Bulan Penyediaan makanan dan minuman	12 Bulan	18.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Klirong	Jumlah Bulan Penyediaan makanan dan minuman	12 Bulan	20.000.000	

No	Rancangan Awal Renja					Hasil Analisis Kebutuhan (Pagu Penetapan)					Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
					(Rp.)					(Rp.)	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kec. Klirong	Jumlah Bulan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	7.962.856	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kec. Klirong	Jumlah Bulan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	9.000.000	
	Penyediaan bahan bacaandan peraturan perundang-undangan	Kec. Klirong	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dok	2.000.000	Penyediaan bahan bacaandan peraturan perundang-undangan	Kec. Klirong	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dok	2.000.000	
	Penyediaan Bahan/Material	Kec. Klirong	Jumlah Paket Bahan/ Material	4 paket	7.000.000	Penyediaan Bahan/Material	Kec. Klirong	Jumlah Paket Bahan/ Material	4 paket	9.190.535	
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kec. Klirong	Jumlah OK yang melakukan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	4 Dokumen	4.000.000	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kec. Klirong	Jumlah OK yang melakukan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	4 Dokumen	4.000.000	
	Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Kec. Klirong	Jumlah Bulan Pengelolaan Arsip	12 Bulan	3.000.000	Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Kec. Klirong	Jumlah Bulan Pengelolaan Arsip	12 Bulan	2.500.000	

No	Rancangan Awal Renja					Hasil Analisis Kebutuhan (Pagu Penetapan)					Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
					(Rp.)					(Rp.)	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	19 Unit	35.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	19 Unit	35.000.000	
	Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	Kec. Klirong	Jumlah Unit Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	3 Unit	30.000.000	Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	Kec. Klirong	Jumlah Unit Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	4 Unit	30.000.000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Klirong	Jumlah Unit Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3 Unit	5.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Klirong	Jumlah Unit Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15 Unit	5.000.000	

No	Rancangan Awal Renja					Hasil Analisis Kebutuhan (Pagu Penetapan)					Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
					(Rp.)					(Rp.)	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	58.500.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	83.932.000	
	Penyediaan jasa surat menyurat	Kec. Klirong	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	1.500.000	Penyediaan jasa surat menyurat	Kec. Klirong	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	1.500.000	
	Penyediaan jasa komunikasi,sumb er daya air dan listrik	Kec. Klirong	Jumlah Bulan Penyediaan jasa komunikasi,su mber daya air dan listrik	12 Bulan	25.000.000	Penyediaan jasa komunikasi,sumbe r daya air dan listrik	Kec. Klirong	Jumlah Bulan Penyediaan jasa komunikasi,sumb er daya air dan listrik	12 Bulan	25.000.000	
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Kec. Klirong	Jumlah Bulan Penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	32.000.000	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Kec. Klirong	Jumlah Bulan Penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	57.432.000	

No	Rancangan Awal Renja					Hasil Analisis Kebutuhan (Pagu Penetapan)					Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
					(Rp.)					(Rp.)	
	Pemeliharaan barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Unit Pemeliharaan barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	33 Unit	42.000.000	Pemeliharaan barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Unit Pemeliharaan barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	33 Unit	46.500.000	
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kec. Klirong	Jumlah Unit Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	13 Unit	30.000.000	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kec. Klirong	Jumlah Unit Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	13 Unit	30.000.000	
	Pemeliharaan mebel	Kec. Klirong	Jumlah Unit Pemeliharaan rutin/berkala Mebel	5 Unit	1.000.000	Pemeliharaan mebel	Kec. Klirong	Jumlah Unit Pemeliharaan rutin/berkala Mebel	5 Unit	1.500.000	
	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Kec. Klirong	Jumlah Unit Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	15 Unit	6.000.000	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Kec. Klirong	Jumlah Unit Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	15 Unit	9.000.000	

No	Rancangan Awal Renja					Hasil Analisis Kebutuhan (Pagu Penetapan)					Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
					(Rp.)					(Rp.)	
	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Kec. Klirong	Jumlah Unit Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	3 unit	5.000.000	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Kec. Klirong	Jumlah Unit Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	3 unit	6.000.000	
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kec. Klirong	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan	89,5	32.000.000	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kec. Klirong	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan	89,5	6.568.000	
	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	Kec. Klirong	Prosentase Pengajuan KTP, KK dan Perizinan Lainnya	100%	32.000.000	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	Kec. Klirong	Prosentase Pengajuan KTP, KK dan Perizinan Lainnya	100%	6.568.000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan	Kec. Klirong	Jumlah pelayanan non perizinan yang dilaksanakan	5 Jenis	32.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan	Kec. Klirong	Jumlah pelayanan non perizinan yang dilaksanakan	5 Jenis	6.568.000	

No	Rancangan Awal Renja					Hasil Analisis Kebutuhan (Pagu Penetapan)					Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
					(Rp.)					(Rp.)	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Klirong	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Jenis	32.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Klirong	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Jenis	6.568.000	
3	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		Indeks Kondusivitas Kecamatan	100%	10.000.000	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		Indeks Kondusivitas Kecamatan	100%	12.000.000	
	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Jumlah Kegiatan dalam Rangka Terselenggara nya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	2	10.000.000	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Jumlah Kegiatan dalam Rangka Terselenggaranya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	2	12.000.000	

No	Rancangan Awal Renja					Hasil Analisis Kebutuhan (Pagu Penetapan)					Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
					(Rp.)					(Rp.)	
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		Jumlah Kegiatan dalam Rangka HUT RI (Paskibra, Karnaval dan Resepsi dalam Rangka HUT RI)	2 Kegiatan	10.000.000	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		Jumlah Kegiatan dalam Rangka HUT RI (Paskibra, Karnaval dan Resepsi dalam Rangka HUT RI)	2 Kegiatan	12.000.000	

No	Rancangan Awal Renja					Hasil Analisis Kebutuhan (Pagu Penetapan)					Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
					(Rp.)					(Rp.)	
4	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Prosentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	38,08%	92.000.000	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Prosentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	38,08%	114.000.000	
	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	8 Keg	92.000.000	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	8 Keg	114.000.000	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Klirong	Jumlah Desa yang terfasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	24 Desa	15.000.000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Klirong	Jumlah Desa yang terfasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	24 Desa	17.000.000	

No	Rancangan Awal Renja					Hasil Analisis Kebutuhan (Pagu Penetapan)					Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
					(Rp.)					(Rp.)	
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa		Jumlah Desa yang di Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0 Desa	0	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa		Jumlah Desa yang di Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0 Desa	0	
	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa		Jumlah Desa yang di Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	24 Desa	0	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa		Jumlah Desa yang di Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	24 Desa	3.000.000	

No	Rancangan Awal Renja					Hasil Analisis Kebutuhan (Pagu Penetapan)					Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
					(Rp.)					(Rp.)	
	Fasilitasi Singkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	Kec. Klirong	Jumlah Desa yang terfasilitasi, jumlah dokumen singkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa, Jumlah Rakor singkronisasi Pembangunan	24 Desa, 2 Dokumen	10.000.000	Fasilitasi Singkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	Kec. Klirong	Jumlah Desa yang terfasilitasi, jumlah dokumen singkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa, Jumlah Rakor singkronisasi Pembangunan	24 Desa, 2 Dokumen	13.000.000	
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec. Klirong	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen	6.000.000	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec. Klirong	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen	11.000.000	

No	Rancangan Awal Renja					Hasil Analisis Kebutuhan (Pagu Penetapan)					Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
					(Rp.)					(Rp.)	
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kec. Klirong	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif, Jumlah Desa yang difasilitasi pembangunan partisipatifnya	2 Dokumen, 24 Desa	20.000.000	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kec. Klirong	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif, Jumlah Desa yang difasilitasi pembangunan partisipatifnya	2 Dokumen, 24 Desa	22.000.000	
	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kec. Klirong	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	6 Dokumen	35.000.000	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kec. Klirong	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	8 Dokumen	38.000.000	

No	Rancangan Awal Renja					Hasil Analisis Kebutuhan (Pagu Penetapan)					Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
					(Rp.)					(Rp.)	
	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kec. Klirong	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	2 Laporan	6.000.000	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kec. Klirong	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	4 Laporan	10.000.000	

Pada table 2.5 di atas ditunjukkan rancangan awal program, kegiatan dan sub kegiatan yang terdapat di Renja Kecamatan Klirong tahun 2026. Untuk seluruh kegiatan dan anggaran yang terdapat di rancangan Renja Kecamatan Klirong tahun 2025 sesuai RKPD sudah dilakukan penyesuaian dengan Renstra tahun 2025-2029 dan sudah sesuai. Pada Anggaran tahun 2026 Kecamatan mempunyai pagu anggaran Rp. 2.397.220.222,- untuk membiayai 4 Program 9 Kegiatan dan 29 Sub Kegiatan.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam rangka menjamin bahwa program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di Kecamatan Klirong sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dilakukan penelaahan terhadap usulan-usulan yang diajukan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat desa dan kecamatan. Penelaahan ini bertujuan untuk memastikan keterpaduan antara aspirasi masyarakat dengan arah kebijakan pembangunan daerah, serta kesesuaian dengan prioritas pembangunan kabupaten.

Berdasarkan hasil Musrenbang dan penjarangan aspirasi masyarakat, usulan program dan kegiatan masyarakat di Kecamatan Klirong dapat dikelompokkan ke dalam beberapa bidang prioritas sebagai berikut:

1. Bidang Sosial dan Pelayanan Dasar

- a. Penguatan layanan administrasi kependudukan yang lebih cepat, mudah, dan berbasis digital.
- b. Dukungan sarana pendidikan anak usia dini (PAUD) dan perbaikan sarana sekolah dasar.
- c. Peningkatan akses layanan kesehatan melalui pengadaan sarana posyandu, pemberdayaan kader kesehatan, dan penyediaan alat kesehatan dasar.

2. Bidang Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat

- a. Pemberdayaan UMKM melalui pelatihan kewirausahaan, pengembangan produk lokal, dan fasilitasi akses pemasaran.
- b. Pengembangan sektor pertanian, perikanan, dan peternakan melalui bantuan sarana produksi serta pelatihan teknis.
- c. Penguatan kelompok masyarakat dan lembaga desa dalam pengelolaan potensi lokal untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

3. **Bidang Pemerintahan dan Ketertiban Umum**

- a. Peningkatan kapasitas aparat desa dan kecamatan melalui pendidikan dan pelatihan.
- b. Dukungan sarana prasarana pelayanan publik di kantor desa maupun kecamatan agar lebih representatif.
- c. Penguatan sistem keamanan dan ketertiban masyarakat melalui sinergi dengan aparat keamanan dan lembaga kemasyarakatan.

4. **Bidang Lingkungan Hidup dan Kebencanaan**

- a. Penguatan program kebersihan lingkungan melalui penyediaan sarana pengelolaan sampah.
- b. Rehabilitasi dan konservasi lingkungan, termasuk penanaman pohon di lahan kritis.
- c. Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana melalui pelatihan, simulasi, dan penguatan kelembagaan tanggap darurat.

Hasil penelaahan menunjukkan bahwa sebagian besar usulan masyarakat sejalan dengan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Kebumen, khususnya dalam mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Namun demikian, diperlukan proses seleksi dan prioritas agar usulan-usulan tersebut dapat disesuaikan dengan kemampuan anggaran serta program pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

BAB III

Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional

Kecamatan merupakan perangkat daerah yang melaksanakan urusan penunjang di bidang pemerintahan umum berdasarkan karakteristik kewilayahan. Tugas dan fungsi kecamatan adalah meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat dan desa. Oleh karena itu, kecamatan lebih banyak berperan dalam hal peningkatan koordinasi dan fasilitasi terhadap kebijakan-kebijakan nasional dengan melaksanakan komunikasi intensif dengan instansi-instansi terkait dalam bidang pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat dan desa. Perencanaan strategis disusun sebagai acuan dalam pengelolaan sumber daya, yang mana diharapkan dengan adanya perencanaan strategis tersebut, pengelolaan sumber daya dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali serta dapat mengakomodasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan internal dan eksternal yang terjadi.

a. Program Prioritas Nasional, yaitu :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim;

b. Program Prioritas Provinsi, yaitu :

1. Menjaga stabilitas sosial, ekonomi, politik, keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Pengendalian inflasi dan ketahanan pangan.

3. Penuntasan pengentasan kemiskinan ekstrem, penurunan angka pengangguran dan stunting.
4. Penanganan dampak perubahan iklim (kekeringan, polusi, dan karhutla).
5. Peningkatan kualitas sistem Pendidikan vokasi.
6. Pengembangan pariwisata dan peningkatan daya saing UMKM di sektor ekonomi kreatif.
7. Pengembangan sistem ekonomi sirkular dan transisi energi.
8. Pengembangan layanan publik dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
9. Meningkatkan pengawasan internal Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dalam rangka mewujudkan sinkronisasi program dari pusat sampai ke daerah, perencanaan program dan kegiatan Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen disusun dengan merujuk pada kebijakan Nasional untuk mendukung berjalannya program dan kegiatan agar sesuai dengan yang di rencanakan. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2026 merupakan tahun pertama dalam pentahapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029.

Kecamatan Klirong mempunyai tugas untuk mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Kebumen 2025-2029. Visi Daerah Kabupaten Kebumen sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2025-2029 yaitu “Kebumen Berdaya : Kebumen Beriman-Maju-Sejahtera-Berbudaya”. Untuk mewujudkan visi tersebut telah ditetapkan 5 (lima) misi pembangunan daerah yaitu:

1. Pengentasan Kemiskinan melalui Pemenuhan Hak Dasar yang Berkeadilan dan Inklusif;
2. Memperkuat Daya Saing Ekonomi Daerah Melalui Sektor Pertanian dalam Arti Luas dan Pengembangan Pariwisata, UMKM Yang Inovatif dan Berkelanjutan Daerah;
3. Percepatan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan;
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, ngopeni, ngayomi, dan ngayemi; dan
5. Mewujudkan masyarakat yang damai, guyub, dan rukun atas

dasar nilai keagamaan dan budaya lokal.

Berdasarkan penjabaran dari Visi Bupati dan Wakil Bupati dan hasil analisa isu-isu strategis RPJMD Kabupaten Kebumen tahun 2025-2029 dapat diuraikan bahwa isu-isu strategis yang terkait langsung dengan tupoksi Kecamatan Klirong adalah :*“Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, ngopeni, ngayomi, dan ngayemi”*.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Berdasarkan rumusan Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan pada Renstra Kecamatan Klirong Tahun 2025-2029, maka tujuan dari Kecamatan Klirong sesuai RPJMD Kabupaten Kebumen adalah untuk mencapai misi “:*“Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, ngopeni, ngayomi, dan ngayemi”*”. Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai dalam Renja Kecamatan Klirong tahun 2026 disajikan pada tabel 3.1.

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja OPD Kecamatan Klirong
Tahun 2026

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN 2026
(1)	(2)	(4)	(5)
	Tujuan :		
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik Kecamatan Klirong	Indeks kepuasan masyarakat Kecamatan Klirong	92 %
	Sasaran :		
2.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kecamatan Klirong	Indeks Tata Kelola Kecamatan Klirong	100%

3.3. Program Dan Kegiatan

Program merupakan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalani misi yang diemban oleh suatu organisasi. Sedangkan kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan.

3.1.1.1. Faktor-Faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan. Adapun yang menjadi pertimbangan dalam penetapan Program dan kegiatan Kecamatan Klirong meliputi:

a) Pencapaian Visi dan misi Kepala Daerah

Perumusan Program dan kegiatan Kecamatan Klirong diarahkan untuk mendukung tercapainya Visi dan Misi Kepala Daerah sesuai dengan fungsi atau urusan yang menjadi wewenangnya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

b) Pencapaian SDGs,

Dalam merumuskan program dan kegiatan di Kecamatan Klirong, pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) menjadi faktor penting yang harus diperhatikan. Program diarahkan pada pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (SDGs 1), memperkuat akses pendidikan dan kesehatan (SDGs 3 dan 4), serta pemberdayaan perempuan dalam ekonomi keluarga (SDGs 5). Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi lokal (SDGs 8) dapat didorong melalui pengembangan pertanian, perikanan, dan UMKM, yang didukung oleh pembangunan infrastruktur dasar yang merata (SDGs 9 dan 11). Sebagai wilayah pesisir, perhatian juga difokuskan pada pengelolaan lingkungan, mitigasi abrasi, dan konservasi sumber daya alam (SDGs 13, 14, dan 15). Seluruhnya memerlukan sinergi dengan berbagai pihak (SDGs 17), sehingga program dan kegiatan yang dirumuskan tidak hanya menyelesaikan persoalan lokal, tetapi juga mendukung tujuan pembangunan nasional dan global secara berkelanjutan.

c) Pengentasan Kemiskinan.

Kemiskinan adalah suatu keadaan dimana terjadi ketidakmampuan seseorang atau keluarga untuk memenuhi kebutuhan dasarnya yaitu kebutuhan makan, sandang, papan

atau perumahan dan Kesehatan. Indonesia dengan jumlah penduduk nomor 4 terbanyak di dunia tentunya tidak terlepas dari masalah kemiskinan. Untuk mengurangi jumlah masyarakat yang hidup miskin, Pemerintah Indonesia dengan bersinergi dengan pemerintah provinsi dan Kabupaten/kota terus berupaya untuk mengentaskan kemiskinan dengan berbagai program kemiskinan.

d) Pelayanan PATEN yang berkualitas

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai pelayanan masyarakat tidak terlepas dari norma, aturan, standar ukuran yang harus dipenuhi agar dapat menjalankan pelayanan secara akuntabel, bisa dipertanggung jawabkan dan berkinerja tinggi. Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal, Kecamatan Klirong telah menyusun Standar Operasional Prosedur maupun Instruksi Kerja sesuai kebutuhan. Penyusunan program dan kegiatan Kecamatan Klirong diarahkan untuk meningkatkan pencapaian standar pelayanan minimal yang harus diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Program yang terkait dengan hal tersebut adalah Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kegiatannya adalah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Non Perijinan.

e) Pendampingan Penyusunan, Pelaksanaan dan Pelaporan APBDes

Dalam rangka memfasilitasi desa dalam pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa, Kecamatan Klirong mengusung Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa. Penyusunan program dan kegiatan Kecamatan Klirong diarahkan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset desa, sehingga menimbulkan tertib administrasi desa.

f) Pendampingan BUMDesa dan Pemberdayaan Masyarakat

Dalam rangka menggali potensi desa dan pemberdayaan masyarakat desa, Program yang ada masih Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa sedangkan kegiatan yang dilakukan adalah Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat.

3.1.2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

a. Jumlah Program dan Jumlah kegiatan

Jumlah Program dan jumlah kegiatan Renja Kecamatan Klirong tahun 2026 yang di usulkan mencakup 4 (Program) program dan 9 (Sembilan Kegiatan) dan 29 (Dua Puluh Sembilan) Sub kegiatan.

b. Sifat Penyebaran Lokasi Program dan Kegiatan

Penyebaran lokasi program dan kegiatan pada dasarnya menyesuaikan dengan kebutuhan, karakteristik wilayah, serta prioritas pembangunan di Kecamatan Klirong. Beberapa program bersifat merata atau tersebar di seluruh desa, terutama yang menyangkut pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, administrasi kependudukan, serta pembangunan infrastruktur jalan dan sanitasi. Program lain bersifat spesifik atau terfokus di wilayah tertentu, misalnya kegiatan pengelolaan lingkungan pesisir dan mitigasi abrasi yang hanya relevan di desa-desa pantai, atau pemberdayaan ekonomi yang dipusatkan di kawasan dengan potensi pertanian dan perikanan. Selain itu, terdapat pula program dengan cakupan kecamatan secara keseluruhan, seperti peningkatan kapasitas aparatur, pelayanan publik terpadu, serta penguatan kelembagaan masyarakat. Dengan demikian, sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan di Kecamatan Klirong bersifat kombinatorik, yaitu sebagian merata di seluruh desa untuk menjamin pemerataan layanan dasar, sebagian lain terfokus pada lokasi tertentu sesuai potensi dan permasalahan spesifik yang ada di wilayah tersebut.

c. Total kebutuhan Dana / Pagu Indikatif.

Total kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang dibutuhkan untuk melaksanakan program dan kegiatan pada tahun 2025 adalah sebesar Rp. 2.397.220.222, - (Dua Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Juta Dua Ratus Dua Puluh Ribu Dua Ratus Dua Puluh Dua Rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU).

3.1.3. Penjelasan Rumusan Program dan Kegiatan di Kecamatan Klirong

Rumusan Program dan kegiatan renja 2026 sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, Pagu Indikatif maupun kombinasi keduanya. Program dan Kegiatan merupakan rencana aksi dari Perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan

sasaran strategis yang telah ditetapkan. Penyusunan Program dan kegiatan dalam Renja Kecamatan Klirong mengacu pada program dan kegiatan yang telah dirumuskan di Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen.

Rumusan program pembangunan daerah menghasilkan rencana pembangunan yang konkrit dalam bentuk program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian keberhasilan pembangunan, kecamatan Klirong menetapkan program-program yang sesuai dengan fungsi penunjang urusan Administrasi Pemerintahan, tugas-tugas Camat dan fungsi Penunjang administrasi umum. Penetapan Program pembangunan urusan tersebut diatas adalah sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.
Dengan kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat dengan sub kegiatan:
 - a. Pelayanan yang terkait dengan non perijinan
 - b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
2. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
Dengan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan sub kegiatan: Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Dengan kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pemerintahan Desa dengan sub kegiatan:
 - a. Fasilitasi Pengelolaan keuangan desa
 - b. Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa
 - c. Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
 - d. Fasilitasi Ketentraman dan ketertiban umum
 - e. Fasilitasi Perencanaan pembangunan partisipatif
 - f. Fasilitasi Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.
 - g. Fasilitasi pendampingan penanggulangan kemiskinan.

4. Program Penunjang urusan pemerintahan daerah Dengan kegiatan sebagai berikut :
- a. Kegiatan Perencanaan dan evaluasi
 - 1) Penyusunan Renstra dan renja
 - 2) Penyusunan dokumen Pevaluasi perangkat daerah
 - b. Kegiatan Administrasi Keuangan
 - 1) Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN
 - 2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - c. Bidang Administrasi Umum meliputi:
 - 1) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.
 - 2) Penyediaan bahan logistic kantor.
 - 3) Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan.
 - 4) Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan.
 - 5) Penyediaan Bahan/Material.
 - 6) Penyelenggaraan rapat koordinasi/konsultasi SKPD.
 - 7) Penataan Arsip Dinamis SKPD.
 - d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya listrik dan air.
 - 2) Penyediaan jasa pelayanan umum kantor.
 - 3) Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
 - e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya.
 - 2) Pengadaan Prasarana dan Sarana Kantor/ Bangunan Lainnya.
 - f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
 - 2) Pemeliharaan Mebel.
 - 3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
 - 4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan Kecamatan Klirong Tahun 2026 memuat program, kegiatan serta pagu indikatif Kecamatan Klirong Tahun 2026. Program dan Kegiatan yang direncanakan untuk kegiatan Tahun 2065 sesuai dengan hasil analisis kebutuhan Kecamatan Klirong.

Rumusan rencana program dan kegiatan tahun 2026 dan prakiraan maju tahun 2027 Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen mencakup 4 (Empat) Program, 9 (Sembilan) kegiatan dan 29 (Dua Puluh Sembilan) sub kegiatan sesuai dengan Permendagri Nomor 90 tahun 2019, yang terinci sebagai berikut:

Tabel 4.1.

Rencana Program Dan Kegiatan Tahun 2026

No	PROGRAM	NO	KEGIATAN/SUB KEGIATAN
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	1.	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat
		1.1	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan pelayanan non-perijinan
		1.2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
2	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	2	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan pemerintahan umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
		2.1	Sub Kegiatan Kegiatan Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD RI tahun 1945, Pelestarian Bhineka tunggal ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan keutuhan Negara kesatuan

No	PROGRAM	NO	KEGIATAN/SUB KEGIATAN
			RI
3	Program Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	3	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan pengawasan Pemerintah desa desa.
		3.1	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan desa dan Pendayagunaan Aset desa.
		3.2	Sub Kegiatan Fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan daerah dengan Pembangunan Desa
		3.3	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
		3.4	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
		3.5	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif.
		3.6	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
		3.7	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa
		3.8	Sub Kegiatan Koordinasi Pendampingan desa diwilayahnya
4	Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah	4	Kegiatan Perencanaan dan evaluasi Kinerja perangkat Daerah
		4.1	Sub Kegiatan Penyusunan Renstra dan Renja perangkat daerah
		4.2	Sub Kegiatan Penyusunan dokumen evaluasi perangkat daerah
		5	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		5.1	Sub Kegiatan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN

No	PROGRAM	NO	KEGIATAN/SUB KEGIATAN
		5.2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
		6	Kegiatan Administrasi umum Perangkat Daerah
		6.1	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
		6.2	Penyediaan bahan logistik kantor
		6.3	Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan
		6.4	Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
		6.5	Penyediaan bahan/material
		6.6	Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		6.7	Penatausahaan arsip dinamis SKPD
		7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		7.1	Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik
		7.2	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
		7.3	Penyediaan jasa surat menyurat
		8	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		8.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		8.2	Pengadaan Prasarana dan Sarana Kantor dan Bangunan Lainnya

No	PROGRAM	NO	KEGIATAN/SUB KEGIATAN
		9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		9.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional; atau Lapangan
		9.2	Pemeliharaan Mebel
		9.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		9.4	Pemerliharan/rehabilitasi gedung Kantor dan bangunan lainnya

Terdapat 4 (Empat) Program, 9 (Sembilan) Kegiatan dan 29 (Dua Puluh Sembilan) Sub Kegiatan yang direncanakan untuk Tahun Anggaran 2026. Program pertama adalah Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik dengan pagu anggaran sebesar Rp. 6.568.000,-,. Program kedua Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 12.000.000,-. Program ketiga Program Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa dengan pagu anggaran sebesar Rp. 114.000.000,- dan yang terakhir Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan pagu sebesar Rp. 2.264.652.222,- sehingga total Pagu Anggaran Tahun 2026 sebesar Rp 2.397.220.222,- (Tiga Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Empat Puluh Empat Rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU). Adapun rincian kerangka pendanaan dapat dilihat pada lampiran dokumen ini.

BAB V PENUTUP

Renja Kecamatan Klirong Tahun 2026 merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang mengamanatkan bahwa setiap SKPD berkewajiban menyiapkan Renja-SKPD.

Renja Kecamatan Klirong Tahun 2026 memiliki kedudukan strategis yang menghubungkan antara perencanaan di Kecamatan Klirong dengan RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2026, serta keterkaitan dengan Renstra Kecamatan Klirong Tahun 2025-2029 dan RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029.

Renja sebagai pedoman bagi pemerintah Kecamatan Klirong di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun kedepan maka perlu diperhatikan hal hal sebagai berikut:

1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian

Untuk dapat merealisasikan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam renja Kecamatan Klirong tahun 2026 dipengaruhi oleh sumber pembiayaan/pendanaan yang memadai, program-program yang berhubungan dengan penanggulangan kemiskinan dan pemulihan ekonomi paska pandemi. Pelaksanaan PATEN yang harus lebih optimal lagi sesuai moto pelayanan di Kecamatan Klirong yaitu SMART (Sinergi, Melayani, Akurat, Ramah dan Transparan) dan tetap mengadopsi protokol kesehatan. Dalam melaksanakan semua program dan kegiatan harus mengikuti petunjuk dan aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen.

Keberhasilan pelaksanaan Renja Kecamatan Klirong tahun 2026 tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab seluruh karyawan karyawan Kecamatan Klirong serta peran aktif stakeholder yang berkepentingan.

2. Kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

- a. Kecamatan Klirong berkewajiban untuk mengimplementasikan pencapaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah di rumuskan dalam Renja Kecamatan Klirong tahun 2026 dan diseleraskan dengan RKPD Kabupaten Kebumen tahun 2026.
- b. Kecamatan Klirong berkewajiban untuk Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Klirong tahun 2026 dengan berpedoman kepada Renja Kecamatan Klirong tahun 2026.
- c. Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan Renja Kecamatan Klirong tahun 2026, wajib dilaksanakan pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan tahun 2026.

3. Rencana Tindak Lanjut (RTL)

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Klirong selain sebagai pedoman Pelaksanaan program dan kegiatan untuk tahun 2026 juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Kecamatan Klirong. Renja Kecamatan Klirong juga memberikan umpan balik dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh pimpinan sehingga diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik. Semoga keberadaan Renja Kecamatan Klirong ini dapat menjadi acuan rencana pembangunan demi tercapaainya visi dan misi Kabupaten Kebumen serta memberikan manfaat bagi proses perencanaan pembangunan Kabupaten Kebumen.

Kebumen, 30 Juli 2025

Camat Klirong

TELAH DIVERIFIKASI OLEN TIM BAPPERIDA	
NAMA	TANDA TANGAN
Agus Setyaningrum	
Cahyo R	



Eko Purwanto, S.STP., M.Si

Pembina Tk.1

NIP. 197901161998101001

LAMPIRAN

BERITA ACARA
KESEPAKATAN HASIL MUSRENBANG RKPD KABUPATEN DI KECAMATAN
KLIRONG
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2024

Pada hari Senin tanggal Delapan Belas Bulan November sampai dengan Rabu tanggal Dua Puluh Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat telah diselenggarakan Musrenbang RKPD Kabupaten Kebumen di Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen yang dihadiri pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir sebagaimana tercantum dalam Lampiran berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar, dan mempertimbangkan:

Pemaparan materi :

1. Camat Klirong
2. Anggota DPRD Kab. Kebumen Dapil 2
3. Dinas dan UPT Terkait
4. Forkopincam Klirong

Tanggapan dan saran dari seluruh peserta Musrenbang RKPD di Kecamatan Klirong terhadap materi yang dipaparkan sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan Musrenbang RKPD di Kecamatan Klirong, maka pada:

Hari/Tanggal : Rabu/ 20 November 2024

Jam : Pukul 11.00 WIB

Tempat : Aula Kecamatan Klirong

Musrenbang RKPD di Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen Tahun 2024

MENYEPAKATI

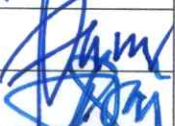
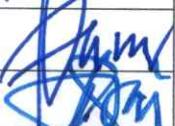
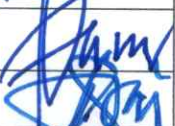
- KESATU** : Program dan kegiatan prioritas dan indikator kinerja yang disertai target dan kebutuhan pendanaan yang telah diselaraskan dengan usulan kegiatan prioritas dari Musrenbang RKPD di Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen;
- KEDUA** : Menyepakati berita acara ini beserta lampirannya, merupakan satu kesatuandan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara hasil kesepakatan Musrenbang RKPD di Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen.
- KETIGA** : Berita acara ini beserta lampirannya dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan Renja Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen Tahun 2026.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kebumen, 20 November 2024
Pimpinan Sidang
CAMAT KLIRONG
KABUPATEN KEBUMEN

EKO PURWANTO, S.STP., M.Si
Pembina Tk.1
NIP. 197901161998101001

Menyetujui,
Wakil Peserta Musrenbang RKPD di Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen

NO.	NAMA	UNSUR PERWAKILAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1.	Subroto	DPRD		
2.	Dr Indrilia	Unsur Perangkat Daerah		
3.	M.	Unsur Kecamatan		
4.	Ismail	Unsur Lembaga		
5.	Zulbiryah	Unsur Masyarakat/ LSM		

DELEGASI KECAMATAN KLIRONG PADA FORUM PD, MUSRENBANG RKPD
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025

NO	NAMA	INSTANSI	ALAMAT	TANDA TANGAN
1.	M. KHAMID			
2.	dr. Indrilia			
3.	SITI M.K.			

**SUSUNAN ACARA MUSRENBANG RKPD KABUPATEN KEBUMEN DI
KECAMATAN KLIRONG TAHUN 2024
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KAB
KEBUMEN TAHUN 2026**

2. Pelaksanaan Musrenbang

Musrenbang RKPD Kabupaten Kebumen di Kecamatan Tahun 2024 dilaksanakan dengan susunan acara sebagai berikut:

- a. Pembukaan.
- b. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya dan Mars Kebumen.
- c. Pembacaan Doa.
- d. Laporan Ketua Penyelenggara
- e. Sambutan- Sambutan.
 1. Sambutan Camat Klirong
 2. Sambutan Tim Monitoring Kabupaten
 3. Sambutan Anggota DPRD Kab. Kebumen Dapil 2
 4. Sambutan Forkopincam
 5. Pemaparan Dinas yang belum paparan saat Pra Musrenbangcam
- f. Pemaparan hasil Pra Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan
- g. Tanggapan dan klarifikasi dari seluruh peserta Musrenbang termasuk narasumber kabupaten.
- h. Penetapan Daftar Prioritas Usulan Desa/Kelurahan Tahun 2026 sebagai Usulan Kegiatan Pembangunan di wilayah Kecamatan Tahun 2026 yang akan diusulkan ke Perangkat Daerah.
- i. Memilih dan menetapkan daftar nama delegasi kecamatan sebanyak 3 (tiga) orang terdiri dari unsur kecamatan, unsur desa, dan perwakilan perempuan atau kelompok masyarakat untuk menjadi peserta Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD Kabupaten.
- j. Penandatanganan Berita Acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD Kabupaten Kebumen di Kecamatan Tahun 2024 dalam Rangka Penyusunan RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2026;
- k. Lain-lain
- l. Penutup

Penyepakatan Daftar Prioritas Usulan Desa Tahun 2026
sebagai Usulan Kegiatan Pembangunan di wilayah Kecamatan Tahun 2026
yang akan diusulkan ke Perangkat Daerah

Kec : Klirong

No (1)	Profil (4)	Usulan (6)	Permasalahan (7)	SKPD Tujuan (10)
1	Kepala Desa Podoluhur	Perbaikan Jalan Kabupaten ruas Podoluhur-Kedungwinangun	Pembangunan Jalan Kabupaten yang Melintasi Desa Podoluhur - Tambakagung- Kedungwinangun Rusak Parah sehingga susah dilewati dan butuh segera diperbaiki Rp. 2.000.000.000,-	DPUPR
2	Kepala Desa Bumiharjo	Pembangunan Jalan Usaha Tani Rt. 02/01 Jomblang Bumiharjo sepanjang 200m	Jalan rusak tak layak lewat Rp 200.000.000	DISTAPANG
3	Kepala Desa Dorowati	Pembangunan dan rehab saluran irigasi Desa Dorowati Dk. Jetis s.d Entak sepanjang 240 meter	Sulitnya akses air masuk ke sawah Dorowati Rp. 200.000.000	DISTAPANG
4	Kepala Desa Gadungrejo	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Dusun Jaliasda Desa Gadungrejo 300 meter	Petani membutuhkan jalan usaha tani Rp 200.000.000	DISTAPANG
9	Kepala Desa Kaliwungu	Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani Desa Kaliwungu sepanjang 400 meter	Rusak dan kurangnya prasarana pertanian di Desa Kaliwungu Rp. 200.000.000	DISTAPANG
10	Kepala Desa Karangglonggong	Pembangunan / rehab JIUT duku Glonggong sepanjang 250 meter	Lahan sawah glonggong kurang pengairannya (200.000.000)	DISTAPANG
11	Kepala Desa Kedadongan	Usulan Bantuan 3 Unit Traktor	Petani kekurangan alat pertanian Rp 66.000.000	DISTAPANG
13	Kepala Desa Kedungwinangun	Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani desa Kedungwinangun Poktan Harapan	Jaringan Irigasi Usaha Tani di Desa Kedungwinangun rusak sehingga butuh perbaikan Rp. 200.000.000	DISTAPANG
19	Kepala Desa Ranterejo	Pembangunan Saluran Irigasi Desa Ranterejo sepanjang 310 meter	Masih kurangnya saluran irigasi sehingga sawah sulit diairi Rp. 200.000.000	DISTAPANG
20	Kepala Desa Tambakagung	Pembangunan Cor Beton dari RW 05 (Jln Gedibrah)sd Podoluhur (DPU PR)	Jalan masih tanah dan melintasi 2 desa Tambakagung dan Podoluhur (Rp 200.000.000)	DPUPR

CAMAT KLIRONG
KABUPATEN KEBUMEN

EKO PURWANTO, S.STP., M.Si
Pembina Tk. 1
NIP. 197901161998101001

Daftar Prioritas Usulan Desa/Kelurahan Tahun 2026
sebagai Usulan Kegiatan Pembangunan di wilayah Kecamatan Tahun 2026
yang akan diusulkan ke Perangkat Daerah

Kec. KLIRONG

(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)
1	Sukirno	Kepala Desa Bendogarap	Infrastruktur Jalan	Pemeliharaan Jalan Kabupaten	Masih terdapat jalan yang rusak belum diperbaiki Rp. 100.000.000	Desa Bendogarap	DPUPR
2	Sukirno	Kepala Desa Bendogarap	Sarpras Jalan	Penyediaan Perlongkapan Jalan (rambu-rambu)	Belum ada rambu rambu. Jalan di depan tempat umum seperti depan sekolah SD Rp. 3.000.000	Desa Bendogarap	Disperkimhub
3	Sukirno	Kepala Desa Bendogarap	Kebencanaan	Sosialisasi Bencana Alam	Kurangnya pemahaman masyarakat tentang tanggap bencana Rp. 3.500.000	Desa Bendogarap	Dinas PPPA
4	Sukirno	Kepala Desa Bendogarap	SDM	Peningkatan Kapasitas BPD	Perlu adanya peningkatan kapasitas BPD Rp. 10.000.000	Desa Bendogarap	Dinas PMD
5	Sukirno	Kepala Desa Bendogarap	Infrastruktur Pertanian	Pembangunan/peningkatan Jalan Usaha Tani	Masih terdapat Jalan Usaha Tani yang belum layak Rp. 200.000.000	RT 02 RW 03	DISTAPANG
6	Sukirno	Kepala Desa Bendogarap	Peternakan/Pertanian	Pengadaan Sapi Ternak	adanya kelompok Tani Ternak yang belum maksimal kegiatannya Rp. 48.000.000	Desa Bendogarap	DISTAPANG
7	ARIS HARGIANTARA, SE	KEPALA DESA BUMIHARJO	Tata Kaloa Lingkungan	Pengadaan Alat Berat untuk normalisasi Saluran	Sungai Drainase mengendap dan dangkal	RW3, RW4 sd RW 5	DPUPR
8	ARIS HARGIANTARA, SE	KEPALA DESA BUMIHARJO	Tata Kaloa Lingkungan	Pengadaan Alat Berat untuk normalisasi Saluran	Saluran irigasi banyak endapan dan padat	RW 4,5 dan 6	DPUPR
9	ARIS HARGIANTARA, SE	KEPALA DESA BUMIHARJO	Infrastruktur Pertanian	Peningkatan Saluran Irigasi Tersier Desa	Bangunan rusak butuh rehabilitasi	RW 4,5 dan 6	Dinas Pertanian dan Pangan
10	ARIS HARGIANTARA, SE	KEPALA DESA BUMIHARJO	Ekonomi Pertanian	Pembangunan Jalan Usaha Tani 200m senilai Rp. 200.000.000	Jalan rusak tak layak lewat	RT 002/001 Jomblang	Dinas Pertanian dan Pangan
11	ARIS HARGIANTARA, SE	KEPALA DESA BUMIHARJO	Ekonomi Pertanian	Pengadaan 1 unit Mesin Pengering Hasil Pertanian	Petani kesulitan pengeringan terkendala cuaca	Gapoktan Khisma Bumiharjo	Dinas Pertanian dan Pangan
12	ARIS HARGIANTARA, SE	KEPALA DESA BUMIHARJO	Pendidikan Anak Usia Dini	Pengadaan Alat Peraga Edukasi 1 paket	Kelurahan Sarpras Pendidikan Anak Usia Dini	KB Bunga Bangsa Bumiharjo	Disdikpora
13	AKHMAD MUNTOYIB	Kepala Desa Dorowati	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Traktor 1 unit Rp. 41.000.000	Kondisi traktor kelompok tani sudah rusak sedang Rp 41.000.000	Poktan Sri Widadi	DISTAPANG
14	AKHMAD MUNTOYIB	Kepala Desa Dorowati	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pompa air 6 Inch 2 unit @ Rp.38.000.000	Rutin terjadi kekeringan di Musim tanam II Rp. 38.000.000	Poktan Sri Lestari	DISTAPANG
15	AKHMAD MUNTOYIB	Kepala Desa Dorowati	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan	Posbindu Kit 5 paket @ 4.000.000	Kebutuhan Poldbang Kesehatan Rp. 20.000.000	5 kelompok	DINKES
16	AKHMAD MUNTOYIB	Kepala Desa Dorowati	Penyelenggaraan Jalan	Pengaspalan Jalan Desa 500 m	Terjadi jalan yang rusak berat Rp. 200.000.000	Dk. Bak	DPUPR
17	AKHMAD MUNTOYIB	Kepala Desa Dorowati	Program Pengelolaan dan Pengembangan sistem Drainase	Pembangunan dan rehab saluran irigasi Rp. 200.000	Sulitnya akses air masuk ke sawah Dorowati Rp. 200.000.000	Dk. Jeta s/d Entak	DPUPR
18	AKHMAD MUNTOYIB	Kepala Desa Dorowati	Pembangunan dan Rehabilitasi Saluran Irigasi		Sulitnya akses air masuk ke sawah Dorowati Rp. 200.000.000	Dk. Jeta s/d Entak	DPUPR
19	KHAMID	Kepala Desa Gedungrejo	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Penyediaan Alasitan prapanan dan pascapanan meliputi traktor roda dua	Kurangnya Alasitan Traktor Rp. 33.000.000	Dusun I,II,III	DISTAPANG
20	KHAMID	Kepala Desa Gedungrejo	Pengelolaan Sumberdaya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro	Pengadaan Dendarm Padi Hibrida 15	Jenis padi yang ditanam di Gedungrejo sering terkena hama wereng Rp. 58.520.000	Dusun I,II,III	DISTAPANG

21	KHAMID	Kepala Desa Gadungrejo	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Petani membutuhkan jalan usaha tani Rp.200.000.000	Dusun Jalsida	DISTAPANG
22	KHAMID	Kepala Desa Gadungrejo	Pembinaan Arsip Desa	Pembinaan Arsip Desa	Pemdes belum memahami secara mendalam tentang arsip desa Rp. 15.000.000	Desa Gadungrejo	DISARPUS
23	KHAMID	Kepala Desa Gadungrejo	Pemberian Sarpras Penerimaan dan Pengelolannya	Sarpras Penerimaan	Dukungan bagi bank sampah masih minim Rp. 50.000.000	Desa Gadungrejo	DLHKP
24	KHAMID	Kepala Desa Gadungrejo	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Saluran Drainase Pemeliharaan dan Rehabilitasi	Drainase Pemukiman Desa belum memadai Rp. 50.000.000	Desa Gadungrejo	DPUPR
25	Daimo	Kepala Desa Gebangsari	Drainase Kesehatan	Peningkatan fasilitas PKD	Fasilitas PKD masih kurang memadai (Rp. 50.000.000)	Dk. Krajan RT 01 RW 02	Dinas Kesehatan, Pengedalian Penduduk dan Keluarga
26	Daimo	Kepala Desa Gebangsari	Pertanian	Penyediaan Kendaraan Roda 3 @Rp. 41.000.000	Belum adanya alat transportasi roda tiga untuk menunjang kegiatan pertanian (Rp. 82.000.000)	Gebangsari	Dinas Pertanian dan Pangan
27	Daimo	Kepala Desa Gebangsari	Pertanian	Pengadaan Blot Bawang Merah (umbi) 0,3 Hektar	Masih banyaknya lahan yang belum dimanfaatkan secara maksimal untuk pertanian (Rp. 18.680.000)	Pesawahan Blok Gentus dan Blok	Dinas Pertanian dan Pangan
28	Daimo	Kepala Desa Gebangsari	Pertanian	Konstruksi Bangunan (Jalan Usaha Tani)	Jalan usaha tani masih tanah, ketika musim hujan sangat memprihatinkan (Rp. 200.000.000)	Blok Telar	Dinas Pertanian dan Pangan
29	Daimo	Kepala Desa Gebangsari	Pertanian	Konstruksi Bangunan(Pembangunan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi Usaha Tani)	Jaringan irigasi masih banyak yang belum terbangun secara permanen (Rp. 200.000.000)	Seluran Irigasi RW 03 dan RW 04	Dinas Pertanian dan Pangan
30	Daimo	Kepala Desa Gebangsari	Pemberdayaan Masyarakat	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan LKAD	Kurangnya pembinaan terhadap lembaga-lembaga milik desa (Rp. 35.000.000)	Gebangsari	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
31	PARJONO	Kepala Desa Jatimalang	Pertanian dan Peternakan	Pengadaan ternak sapi PO betina, kambing betina, jantan dan kambing beserta bibit HPT dan pembinaan teknis budidaya	kurangnya modal usaha kelompok tani ternak (Rp. 150.000.000)	Jatimalang	DISTAPANG
32	PARJONO	Kepala Desa Jatimalang	Infrastruktur Pertanian	Konstruksi bangunan dan sarana pendukungnya	Jaringan saluran irigasi banyak yang sudah rusak (Rp. 200.000.000)	Jatimalang	DISTAPANG
33	PARJONO	Kepala Desa Jatimalang	Infrastruktur Kesehatan Desa	Rehabilitasi dan pemeliharaan gedung PKD	Rusaknya bangunan PKD Rp. 50.000.000	Jatimalang	DINAS KESEHATAN
34	PARJONO	Kepala Desa Jatimalang	Sarpras Kesehatan Desa	Pengadaan alat kesehatan PKD	Kurangnya fasilitas sarana alat kesehatan di PKD Rp. 25.000.000	Jatimalang	DINAS KESEHATAN
35	PARJONO	Kepala Desa Jatimalang	Tata Ruang	Panjang Saluran Drainase yang dipelihara / Direhabilitasi /dibangun	Rusaknya saluran drainase Rp. 200.000.000	Jatimalang	DPU
36	PARJONO	Kepala Desa Jatimalang	Pemberdayaan Masyarakat	Fasilitas Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan	Kurangnya pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi Rp. 10.659.000	Jatimalang	DINAS SOSIAL
37	AJI DANU HARJANTO	Kepala Desa Jerukagung	Perencanaan jalan di jalan Kabupaten	Penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten (Lampu Jalan)	Jalan Gelap sering terjadi kecelakaan Rp 190.000.000	Jalan Kabupaten di Jerukagung	Departemhuh
38	AJI DANU HARJANTO	Kepala Desa Jerukagung	Pengawasan penggunaan sarana pertanian	Cultivator	Banyak pekarangan yang kurang produktif Rp. 21.000.000	KWT Desa Jerukagung	Dinas Pertanian dan pangan
39	AJI DANU HARJANTO	Kepala Desa Jerukagung	Pengawasan penggunaan sarana pertanian	Pembangunan JUT	Pada saat panen kesulitan dalam membawa hasil panen Rp. 200.000.000	Petani Jerukagung	Dinas Pertanian dan pangan
40	AJI DANU HARJANTO	Kepala Desa Jerukagung	Pengawasan penggunaan sarana pertanian	Kendaraan Roda Tiga	Kesulitan dalam membawa hasil panen Rp. 41.000.000	KWT Desa Jerukagung	Dinas Pertanian dan pangan
41	AJI DANU HARJANTO	Kepala Desa Jerukagung	Pengawasan penggunaan sarana pertanian	TR2 Rotari	Paran selalu terlambat Rp 48.000.000	Gapokdan Agung Makmur	Dinas Pertanian dan pangan
42	AJI DANU HARJANTO	Kepala Desa Jerukagung	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten	Pembangunan Jalan	Banyak jalan yang berlobang Rp 1.000.000.000	Desa Jerukagung	DPU
43	M MUHTASIMUDIN, S.Pd.I.	Kepala Desa Jogosimo	Penyelenggaraan Jalan	Pemeliharaan Jalan Kabupaten di desa	Rusaknya Jalan Kabupaten yang ada di Desa Rp. 200.000.000	Ruas Jalan Jogosimo - Jogomertan	DPU
44	M MUHTASIMUDIN, S.Pd.I.	Kepala Desa Jogosimo	Program Pengembangan Kebudayaan	Perlindungan, pengembangan, pemanfaatan objek pemajuan tradisi budaya	Besarnya Operasional Adat Budaya Jogosimo Suran Rp 50.000.000	Desa Jogosimo	DISPARBUD

45	M MUHTASIMUDIN, S.Pd.I.	Kepala Desa Jogosimo	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	3) Pengadaan alatiran prapangan dan pascapangan (Kendaraan roda 3)	Belum adanya alat transportasi roda tiga untuk menunjang kegiatan pertanian Rp 84.000.000	Desa Jogosimo	DISTAPANG
46	M MUHTASIMUDIN, S.Pd.I.	Kepala Desa Jogosimo	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	LPUJ Solar Cell 100 Watt	Kurangnya Peningkatan Jalan Umum Di Desa Rp. 150.000.000	Desa Jogosimo	DISPERKIMHUB
47	M MUHTASIMUDIN, S.Pd.I.	Kepala Desa Jogosimo	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Penyediaan Sarpras Penunjang Fungsi Hunian (Bantuan Pembangunan MCK 10 unit)	Masih adanya warga yang belum punya jamban / MCK Mandiri Rp 60.000.000	Desa Jogosimo	DISPERKIMHUB
48	M MUHTASIMUDIN, S.Pd.I.	Kepala Desa Jogosimo	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh (Bantuan Pengurangan RTLH)	Perbaikan RTLH untuk pencegahan tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh (RTLH 10 unit)	Masih adanya RTLH di Desa Rp. 100.000.000	Desa Jogosimo	DISPERKIMHUB
49	AGUS ARIFIN	Kepala Desa Kaliwungu	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) (satu) daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang di Bawah 1000 Ha dalam Satu Daerah Kabupaten / Kota	masih adanya sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang dibawah 1000 Ha dalam satu daerah Kabupaten/Kota Rp. 50.000.000	Desa Kaliwungu	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen
50	AGUS ARIFIN	Kepala Desa Kaliwungu	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Pembangunan Sistem Drainase	Kurangnya sistem drainase yang memadai Rp. 200.000.000	Desa Kaliwungu	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen
51	AGUS ARIFIN	Kepala Desa Kaliwungu	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan prasarana pertanian	kurangnya prasarana pertanian Rp. 200.000.000	Desa Kaliwungu	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen
52	AGUS ARIFIN	Kepala Desa Kaliwungu	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan prasarana pertanian	kurangnya prasarana pertanian Rp. 200.000.000	Desa Kaliwungu	Dinas Pertanian dan Pangan
53	AGUS ARIFIN	Kepala Desa Kaliwungu	Program Peningkatan Kerawanan Pangan	Pengawasan Pembangunan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan komoditas, Teknologi, dan Spesifik Lokasi	kurangnya pemerataan air pada sawah petani Rp. 45.000.000	Desa Kaliwungu	Dinas Pertanian dan Pangan
54	AGUS ARIFIN	Kepala Desa Kaliwungu	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Pencocokan Perumahan dan Kawasan permukiman kumuh pada daerah kabupaten / Kota	masih adanya warga yang memiliki hunian kurang layak huni Rp. 20.000.000	Desa Kaliwungu	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertubuhan
55	Mukhamad Khamid	Kepala Desa Karangglonggong	Bencana alam	Bantuan bagi warga yang tertimpa bencana alam	Korban bencana banyak yang tidak terbeli (Sunit x 30.000.000 = 90.000.000)	RW 01 / RW 02	Disperkimhub
56	Mukhamad Khamid	Kepala Desa Karangglonggong	Penerangan jalan	LPUJ Solar Cell 100 watt	Jalan Kabupaten kurang penerangan (1 unit x 33.000.000 = 33.000.000)	Dukuh Glonggong	Disperkimhub
57	Mukhamad Khamid	Kepala Desa Karangglonggong	Pertanian pasca panen	Bantuan 1 unit Kendaraan roda 3 dan gerobak sorong 3 unit	Hasil panen banyak yang tidak tertangani (41.000.000 + 6.000.000 = 48.000.000)	Gapoktan Tani Makmur	Distapang
58	Mukhamad Khamid	Kepala Desa Karangglonggong	Jalan usaha tani/pertanian	Pembangunan / rehab JUT dukuh Glonggong	JUT banyak yang rusak/berombang (200.000.000)	Dukuh Glonggong	Distapang
59	Mukhamad Khamid	Kepala Desa Karangglonggong	Perkebunan	Bantuan bibit kelengkeng	Banyak lahan kosong / terbelengkalai (10.000.000)	Gapoktan Tani Makmur	Distapang
60	Mukhamad Khamid	Kepala Desa Karangglonggong	Pengaliran	Pembangunan / rehab JIUT dukuh Glonggong	Lahan sawah glonggong kurang pengalirannya (200.000.000)	Dukuh Glonggong	Distapang
61	Marjuni	Kepala Desa Kebedongan	Distapang	JIDES	Pembangunan lama sudah rusak Rp. 200.000.000	RT 01 RW 03 Kebedongan	Distapang
62	Marjuni	Kepala Desa Kebedongan	Distapang	Traktor	Petani kekurangan alat pertanian Rp 88.000.000	Desa Kebedongan	Distapang
63	Marjuni	Kepala Desa Kebedongan	Dinas Kesehatan	Terbangunnya Jamban Keluarga	Keluarga belum mempunyai jamban Rp 30.000.000	Desa Kebedongan	Dinas Kesehatan
64	Marjuni	Kepala Desa Kebedongan	Dinas PUPR	Pembangunan Rabat Jalan Desa	Jalan masih menggunakan kerokos Rp. 200.000.000	RT 01 RW 03 Kebedongan	Dinas PUPR
65	Marjuni	Kepala Desa Kebedongan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Demploet Perikanan	Masih perlu penambahan modal Rp 20.000.000	Desa Kebedongan	Dinas Kelautan dan Perikanan
66	Marjuni	Kepala Desa Kebedongan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Bantuan Sarpras Peningkatan daya selang usaha	Kolam belum perramen dan masih perlu penambahan kuantitas Rp. 50.000.000		Dinas Kelautan dan Perikanan
67	SARJONO, S.H	Kepala Desa Kedungsari	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertubuhan Kab. Kebumen	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah rumah korban bencana yang direhabilitasi/direlokasi Rp 80.000.000	Masyarakat Rw 003 & Rw 004	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertubuhan Kab. Kebumen

87	Puji Santoso	Kepala Desa Klegenwonosari	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Sosialisasi, Pelatihan dan Edukasi Rawan Bencana 100 org @ 482.000	Kurangnya pengetahuan tentang penanggulangan bencana (Rp 48.200.000)	Desa Klegenwonosari	BPBD
88	Puji Santoso	Kepala Desa Klegenwonosari	Program penyediaan dan pengembangan sarana	Bantuan Sumur Bor Listrik 2 unit @ 30.000.000	Pengaliran di lahan sawah Klegenwonosari tidak maksimal (Rp 80.000.000)	Desa Klegenwonosari	DISTAPANG
89	Puji Santoso	Kepala Desa Klegenwonosari	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan Jitir 1 unit @ 200.000.000	Saluran Irigasi rusak (Rp 200.000.000)	RT. 03 RW 01	DISTAPANG
90	Puji Santoso	Kepala Desa Klegenwonosari	Pembangunan Prasarana pertanian	Pembangunan Jides 1 unit @ 200.000.000	Saluran Irigasi rusak (Rp 200.000.000)	RT. 03 RW 01	DISTAPANG
91	SLAMET	Kepala Desa Kilong	Perumahan dan lingkungan hidup	Bansos Penugasan RTLH	Masih ada rumah tidak layak huni (75.000.000)	Desa Kilong	DPKPLH
92	SLAMET	Kepala Desa Kilong	peribngunan Infrastruktur desa	Normalisasi Sungai Sentul dan kali Kathing	terjadi erosi dan juga pendangkalan di baritan sungai sentul dan kali kathing (50.000.000)	Kali Kathing dan Sungai Sentul	DPUPR
93	SLAMET	Kepala Desa Kilong	pendidikan	Alat Peraga Edukative (APE) untuk PAUD, Tk dan TPQ	sarana Bermain PAUD, Tk dan TPQ perlu ditingkatkan (20.000.000)	TK, TPQ dan PAUD Desa	Dinas Pendidikan
94	SLAMET	Kepala Desa Kilong	pertanian	Peningkatan jalan usaha tani (JUT)	JUT masih belum layak (200.000.000)	Sawah Blok 2 dan 7	Dinas Pertanian dan Pangan
95	SLAMET	Kepala Desa Kilong	pertanian	Terbangunnya Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT)	Sering kekurangan air irigasi (155.000.000)	Desa Kilong	DPUPR
96	SLAMET	Kepala Desa Kilong	pemuda dan olahraga	Sarpras Olah Raga Desa	Kurangnya sarpras lapangan bola volley, bulu tangkis dan tenis meja (45.000.000)	Desa Kilong	Dibas Pendidikan
97	SUTOMO	Kepala Desa Pandanlor	Pertanian	SARPRAS Petanian (Kultifator)	Kekurangan ALSINTAN Rp. 45.000.000	Desa Kilong	DISTAPANG
98	SUTOMO	Kepala Desa Pandanlor	Peternakan	BIBIT SAPI	Kurangnya Populasi Ternak yang berkualitas Rp. 500.000.000	Desa Kilong	DISTAPANG
99	SUTOMO	Kepala Desa Pandanlor	Infrastruktur Jalan	Pembangunan Jembatan Kali Sentul	Kurangnya akses menuju lahan pertanian Rp. 500.000.000	Rt 02 Rw 03 Desa Pandanlor	DPUPR
100	SUTOMO	Kepala Desa Pandanlor	Infrastruktur Jalan	Pembangunan Jembatan Dugbambung Kali Kathing	Memperlebar jalan lintas antar desa Rp. 500.000.000	Rt 03 Rw 01 Desa Pandanlor	DPUPR
101	SUTOMO	Kepala Desa Pandanlor	Tata Ruang	Pembangunan Talud Dugbambung Kali Kathing	Tanah sering erosi Rp 500.000.000	Rt 03 Rw 01 Desa Pandanlor	BPBD
102	SUTOMO	Kepala Desa Pandanlor	Tata Ruang	Pembangunan Talud Trowong Kali Kathing	Tanah sering erosi Rp 500.000.000	Rt 02 Rw 01 Desa Pandanlor	BPBD
103	ASRODIN	Kepala Desa Podoluhur	Pertanian	JUT (Pembangunan Talud)	Tanah irigasi sering gugur Rp. 200.000.000	Rt 01-02 Rw 01-Perbatasan Desa	
104	ASRODIN	Kepala Desa Podoluhur	Infrastruktur Jalan	Pembangunan Jalan Desa (Aspal)	Jalan Rusak Rp. 200.000.000	Rt 01-02 Rw 01	
105	ASRODIN	Kepala Desa Podoluhur	Infrastruktur Pertanian	JUT (Pembangunan Aspal)	Jalan Usaha Tani Rusak Parah Rp. 200.000.000	Rt 01-02 Rw 05	
106	ASRODIN	Kepala Desa Podoluhur	Pertanian	JUT (Pembangunan Talud)	Tanah Irigasi sering gugur Rp. 150.000.000	Rt 01-02 Rw 05	
107	ASRODIN	Kepala Desa Podoluhur	Pertanian	JITUT	Saluran Irigasi Bermasalah Rp. 195.000.000	Rt 02 Rw 01	
108	ASRODIN	Kepala Desa Podoluhur	Pertanian	JITUT	Saluran Irigasi Bermasalah Rp. 195.000.000	Rt 01 Rw 02 - Rt 03 Rw 05	
109	TANTO KUSWOYO	Kepala Desa Ranterejo	Perumahan dan Lingkungan Hidup	Pembangunan/ Perbaikan RTLH	Masih ditemukan 10 rumah yang tidak layak huni Rp. 200.000.000	Desa Ranterejo	DISPERKIMHUBLH
110	TANTO KUSWOYO	Kepala Desa Ranterejo	keehatan	Bantuan SPAL	Masih banyak ditemukan limbah cair rumah tangga yang belum teratasi Rp. 60.000.000	Desa Ranterejo	DINKES
111	TANTO KUSWOYO	Kepala Desa Ranterejo	Jalan Desa	Pembangunan Jalan Desa	Jalan desa banyak yang rusak Rp. 150.000.000	Desa Ranterejo	DPUPR
112	TANTO KUSWOYO	Kepala Desa Ranterejo	Lingkungan	Pembangunan Drainase	pembuangan air masih kurang Rp. 150.000.000	Desa Ranterejo	DPUPR
113	TANTO KUSWOYO	Kepala Desa Ranterejo	Pertanian	Hibah barang pompa air	masih kurangnya ketersediaan pompa air di desa Rp. 150.000.000	Desa Ranterejo	DISTAPANG

114	TANTO KUSWOYO	Kepala Desa Ranterejo	Pertanian	Pembangunan Saluran Irigasi	masih kurangnya saluran irigasi Rp. 200.000.000	Desa Ranterejo	DISTAPANG
115	HARUN ALRASID	Kepala Desa Sitirejo	Pertanian	Pembinaan dan bantuan bibit/ benih untuk pemanfaatan lahan pekarangan	Lahan pekarangan kosong kurangnya pemanfaatan untuk mendukung ketahanan pangan (Rp. 30.000.000)	Sitirejo	DISTAPANG
116	HARUN ALRASID	Kepala Desa Sitirejo	Peternakan	Bantuan bibit kambing dan pembinaan budidaya ternak	Kelompok yang ada tidak berkembang perlu dukungan dan pembinaan (Rp. 55.000.000)	Kelompok Ternak Sitirejo	DISTAPANG
117	HARUN ALRASID	Kepala Desa Sitirejo	Pertanian	Pelatihan penanggungan hama pengganggu pertanian padi	Hasil panen menurun karena serangan hama (Rp. 50.000.000)	Gapoktan Sitirejo	DISTAPANG
118	HARUN ALRASID	Kepala Desa Sitirejo	Pertanian	Pembangunan Saluran Irigasi	Saluran yang ada rusak tidak bisa dimanfaatkan Rp. 200.000.000	Saluran Irigasi RT 02/01	DISTAPANG
119	HARUN ALRASID	Kepala Desa Sitirejo	Asrip	Pembinaan Asrip Desa	Pengarsipan belum tertib dan tertata (Rp. 5.000.000)	Kantor Desa Sitirejo	Dinas Kearsipan
120	HARUN ALRASID	Kepala Desa Sitirejo	Kesehatan	Pengadaan Kit Stunting dan Nilaht Anti Stunting	Pemahaman masyarakat akan stunting masih rendah (Rp.15.000.000)	Kantor Desa Sitirejo	Dinas Kesehatan
121	Adela Sulistiana	Kepala Desa Tambakagung	Sarana Olah Raga	Pembangunan Gedung Olah Raga (DISPORA)	Belum adanya Gedung Olah Raga Di Desa (Rp.400.000.000,-)	Desa Tambakagung	
122	Adela Sulistiana	Kepala Desa Tambakagung	Pertanian	Pembangunan JITU (DISTAPANG)	Saluran Irigasi dari RW 03 sd RW 02 belum di talud (Rp. 200.000.000)	rt 03/2 Tambakagnug	
123	Adela Sulistiana	Kepala Desa Tambakagung	Perekonomian	Pembangunan Cor Beton dari RW 05 (Jln Gedibrah) sd Podoluhur (DPU PR)	Jalan masih tanah dan melintasi 2 desa Tambakagung dan Podoluhur (Rp.200.000.000)	Desa Tambakagung RW 5	
124	Adela Sulistiana	Kepala Desa Tambakagung	Pertanian	Pembangunan Sumur Bor (DISTAPANG)	Dimusim Sedon sawah di Tambakagung banyak yang kekurangan (Rp.20.000.000)	Desa Tambakagung	
125	Adela Sulistiana	Kepala Desa Tambakagung	Pendidikan	Pembangunan Ruang Kelas PAUD	Ruang kelas Paud di desa Tambakagung sudah rusak dan butuh Direhab (Rp.70.000.000)	Desa Tambakagung	
126	Adela Sulistiana	Kepala Desa Tambakagung	Pendidikan	Pembangunan Kanopi TK	Gedung TK Tunas Harapan Tambakagung Belum ada Kanopi depannya sehingga ketika hujan air bisa masuk ke ruangan kelas (Rp.10.000.000)		
127	MUSLIKHUDIN	Kepala Desa Tambakprogoten	Pertanian	Corporate Farming Jagung (15 Ha)	Belum adanya proses budidaya jagung yang baik (Rp. 78.875.000,00)	Kelompok Tani	Distapang
128	MUSLIKHUDIN	Kepala Desa Tambakprogoten	Pertanian	Pengadaan alatiran prapanen dan pascapanen, pompa air 3 "	Kekurangan Sarpas Pertanian (Rp. 84.000.000,00)	Kelompok Tani	Distapang
129	MUSLIKHUDIN	Kepala Desa Tambakprogoten	Pertanian	Kendaraan Roda Tiga	Kekurangan Sarpas Pertanian (Rp. 78.480.600,00)	Kelompok Tani	Distapang
130	MUSLIKHUDIN	Kepala Desa Tambakprogoten	Penerangan Jalan	Penyediaan lampu penerangan jalan	Jalan masih kekurangan penerangan (Rp. 92.000.000)	Desa Tambakprogoten	Diperkimhub
131	MUSLIKHUDIN	Kepala Desa Tambakprogoten	Peternakan	Pengadaan Ternak Sapi PO Betina; Kambing Betina; Kambing Jantan dan Kambing beserta bibit HPT dan pembinaan ternis budidaya ternak	masih kurangnya bibit ternak unggul (Rp. 92.000.000)	Kelompok ternak	Distapang
132	MUSLIKHUDIN	Kepala Desa Tambakprogoten	Pertanian	Konstruksi Bangunan/Pembangunan Prasarana Pertanian	Jalan usaha tani tidak layak (Rp. 200.000.000)	Desa Tambakprogoten	Distapang
133	Kasimin	Kepala Desa Tanggulangin	Perdagangan	Pembinaan UMKM dan Usahanya	Masih banyaknya UMKM yang kurang pengetahuan pemasaran produknya Rp. 50.000.000,-	Desa Tanggulangin	Diperindaggar
134	Kasimin	Kepala Desa Tanggulangin	Kebencanaan	Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana	Pengetahuan pencegahan bencana sangat diperlukan kesiapsiagaan tinggi Rp. 26.500.000,-	Desa Tanggulangin	BPBD Kebumen

135	Kasimin	Kepala Desa Tanggulangin	Infrastruktur	Bantuan Samen	Masih banyaknya jalan jalan lingkungan yang masih berupa jalan tanah Rp. 22.000.000,-	Desa Tanggulangin	DPUPR
136	Kasimin	Kepala Desa Tanggulangin	Kebencanaan	Pelatihan penanganan bencana	Kurangnya pengetahuan penanganan bencana darurat Rp. 25.000.000,-	Desa Tanggulangin	BPRD Kebumen
137	Kaelmin	Kepala Desa Tanggulangin	Kesehatan	Bantuan Satpras Pustu	Sarana prasarana kesehatan Pustu minim Rp. 25.000.000,-	Duaun Sidomulyo	Dinas Kesehatan
138	Kasimin	Kepala Desa Tanggulangin	Kemiskinan	Bantuan RTLH	Masih banyak terdapat RTLH Rp. 100.000.000,-	Desa Tanggulangin	Disperkimhub
139	Eli Sugiono	Kepala Desa Wotuwono	Dinas SDA	Pembangunan Saluran Drainase (Kali Kating)	Saluran Irigasi mAsih tanah belum ada tanggul sama sekali dan masih sering tergerus air Rp. 275.000.000,-	RW.01 Ke RW.02 Desa Wotuwono	Dinas SDA
140	Eli Sugiono	Kepala Desa Wotuwono	Distapang	Bantuan Pohon Buah-Buahan	Untuk meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kurang Mampu Rp. 30.000.000,-	Desa Wotuwono	Distapang
141	Eli Sugiono	Kepala Desa Wotuwono	Distapang	Pembangunan Pasangan Batu dan Penggalian	Irigasi Masih tanah belum terjamah pembangunan dan sangat dangkal perlu ada rehabilitasi dan Pembangunan Rp. 270.000.000,-	RW.01 Ke RW.02 Desa Wotuwono	Distapang
142	Eli Sugiono	Kepala Desa Wotuwono	Distapang	Pembangunan Irigasi Tersier dari Rw 2 Ke Kedungwinangun	Letak irigasi yang berada di Desa Kedungwinangun akan tetapi aliran irigasi tersebut mengalir pertanian Desa Wotuwono dan sampai saat ini masih belum terjamah pembangunan Rp. 100.000.000,-	Rw.02 Ke Kedungwinangun	Distapang
143	Eli Sugiono	Kepala Desa Wotuwono	Dinas PUPR	Pembangunan Talud Jalan Sijaran	Jalan belum ada taludnya karena sangat memprihatinkan karena jalan tersebut untuk akses Perekonomian Desa Wotuwono dan belum ada taludnya jadi jalannya sering longsor Rp. 200.000.000,-	RW. 02 Desa Wotuwono	Dinas PUPR
144	Eli Sugiono	Kepala Desa Wotuwono	Dinas PUPR	Pembangunan Talud Jalan Ke arah Desa Rantorejo	Jalan masih belum ada Pembangunan Talud karena berada di antara desa karanglonggong dan rantorejo dan sampai saat ini jalan tersebut belum ada pembangunan Taludnya jadi jalan sering rusak Rp. 100.000.000,-	Rw. 01 Desa Wotuwono	Dinas PUPR